



Menyambung Asa GEMA CITA:

Masa Depan

Bebas Perkawinan Anak

*GEMA CITA: Sustaining Hope
for a Future Free from Child Marriage*

Judul Buku : Menyambung Asa GEMA CITA: Masa Depan Bebas Perkawinan Anak
GEMA CITA: Sustaining Hope for a Future Free from Child Marriage
Penerbit : Yayasan Plan International Indonesia
Cetakan : Pertama, 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

Copyright © 2024 Yayasan Plan International Indonesia

Yayasan Plan International Indonesia
Komplek Buncit Utama Kav. 16
Jl. Warung Jati Barat RT 001/RW 005
Kelurahan Jati padang, Kecamatan Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12549



**Menyambung Asa
GEMA CITA:
Masa Depan
Bebas Perkawinan Anak**

*GEMA CITA: Sustaining Hope
for a Future Free from Child Marriage*

Kata Pengantar

Dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur, kami hadirkan buku ini untuk berbagi kisah-kisah sukses dari Program Generasi Emas Bangsa Bebas Perkawinan Usia Anak (GEMA CITA), yang telah berlangsung sejak tahun 2021. Berkat kerja keras dan kolaborasi yang luar biasa di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Sukabumi, kita telah bersama-sama menciptakan perubahan nyata dalam mengurangi perkawinan usia anak dan membuka peluang masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak dan kaum muda, terutama perempuan.

GEMA CITA tidak hanya bekerja dengan orang dewasa, tetapi juga melibatkan kaum muda melalui kampanye, advokasi, dan aktivitas lainnya. Apa yang membuat kami semakin bangga adalah peran aktif kaum muda dalam program ini. Sebanyak 310 pendidik sebaya (210 perempuan dan 100 laki-laki) dari ketiga kabupaten ini telah menjadi suara yang kuat dalam menyuarakan isu perkawinan usia anak di sekolah-sekolah dan komunitas mereka. Mereka tidak hanya berbicara, tetapi juga bergerak untuk memberikan edukasi dan menginspirasi perubahan nyata di lingkungan mereka.

Selain itu, 60 *youth advocate* juga telah terlibat langsung dalam mendukung Rencana Aksi Daerah (RAD) dan bergabung dengan SATGAS di Sukabumi dan Lombok Barat. Partisipasi mereka membuktikan bahwa anak-anak dan kaum muda memiliki kekuatan dan pengaruh besar dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak. Mereka adalah agen perubahan yang terus membawa harapan dan masa depan yang lebih baik bagi kita semua.

Namun, perjalanan ini belum selesai. Kami berharap buku ini menginspirasi para pembaca untuk terus terlibat, berbicara, dan beraksi demi masa depan yang lebih baik dan bebas dari perkawinan usia anak. Kami yakin, dengan semangat dan kolaborasi seperti yang telah kami lakukan dengan PATBM dan tim SRA, kita bisa membawa perubahan yang lebih besar lagi yang berpihak pada keterbaikan anak.

Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah berperan dalam perjalanan ini—terutama bagi kalian, kaum muda, yang dengan semangat dan tekadnya ikut membangun masa depan yang lebih baik tanpa perkawinan anak untuk kita semua.

Mari kita katakan tidak pada kawin anak.

Dini Widiastuti

Direktur Eksekutif

Yayasan Plan International Indonesia

Foreword

With great pride and gratitude, we present this book, sharing the success stories from the GEMA CITA Program (End Child Marriage), which has been running since 2021. Through the dedicated efforts and strong collaboration in the districts of West Lombok, Nagekeo, and Sukabumi, we have collectively made real strides in reducing child marriage and opening the door to brighter futures for children and young people, especially girls.

GEMA CITA is not just about working with adults; it's about empowering youth to take the lead through campaigns, advocacy, and a range of other activities. What makes us especially proud is the active role of young people in this program. A total of 310 peer educators (210 girls and 100 boys) across these three districts have become powerful voices, raising awareness of child marriage in their schools and communities. They don't just speak out—they act, educating their peers and inspiring real, lasting change.

In Addition, 60 youth advocates have played a key role in supporting the Regional Action Plan (RAD) and joining task forces (SATGAS) in Sukabumi and West Lombok. Their involvement proves that children and young people hold immense power and influence in preventing child marriage. They are true agents of change, carrying forward the hope for a better future for all.

However, our journey is far from over. We hope this book inspires readers to continue engaging, raising their voices, and taking action for a future free from child marriage. We are confident that with the same passion and collaboration we have built with the Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) and the Child-Friendly School (SRA) team, we can drive even greater change, ensuring a future where every child can thrive.

Our deepest thanks go to all who have contributed to this journey—especially the young people, whose courage and determination are shaping a future free from child marriage for everyone.

Together, let's say no to child marriage.

Dini Widiastuti

Executive Director

Plan International Indonesia Foundation

GEMA CITA (Generasi Emas Bangsa Bebas Perkawinan Usia Anak) GEMA CITA (End Child Marriage)

Program GEMA CITA berfokus pada pencegahan perkawinan anak dan kehamilan remaja. Program ini bertujuan agar remaja dan kaum muda, khususnya perempuan, mampu membuat keputusan yang tepat dan benar untuk hidup bebas dari perkawinan anak dan kehamilan remaja. GEMA CITA bergerak untuk meningkatkan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan melalui pendekatan Partisipasi Bermakna, Pendidikan Sebaya (*peer to peer education*), Mekanisme Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, dan Advokasi Kebijakan yang responsif gender di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Nagekeo.

Program ini dimulai sejak Januari 2022 hingga September 2024 mendampingi 6 desa dan 13 sekolah dari 3 kabupaten – Lombok Barat, Sukabumi, dan Nagekeo. Program ini berkolaborasi dengan pemerintah dalam membentuk dan memfungsikan peran Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Sekolah Ramah Anak (SRA), dan Pendidik Sebaya dalam upaya pencegahan, pengurangan dan penghapusan perkawinan anak, dan kehamilan remaja.

The GEMA CITA program is dedicated to preventing child marriage and teenage pregnancy by empowering adolescents and young people, particularly girls, to make informed and responsible decisions, enabling them to live free from child marriage and early pregnancy. GEMA CITA is committed to enhancing Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR), gender equality, and the empowerment of women and girls through meaningful youth engagement, peer-to-peer education, community-based child protection mechanism, and gender-responsive policy advocacy in West Lombok, Sukabumi, and Nagekeo districts.

Launched in January 2022 and running through September 2024, GEMA CITA works in partnership with 6 villages and 13 schools across 3 districts—West Lombok, Sukabumi, and Nagekeo. By collaborating with local governments, GEMA CITA establishes and strengthens the role of Community-Based Integrated Child Protection (PATBM), Child Friendly School (SRA), and Peer Educators to prevent, reduce, and ultimately eliminate child marriage and teenage pregnancy.

Capaian hingga 2024 Key Achievements by 2024:



Melatih Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) kepada 50 *master trainer*, 376 pendidik sebaya, dan 5.644 remaja usia 13-24 tahun.

Trained 59 master trainers, 376 peer educators, and 5.644 adolescent aged 13-24 in Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR).



Membentuk dan memfungsikan 6 PATBM dan 13 SRA.

Established and operationalized 6 PATBM and 13 SRAs.



Mendampingi 218 orang anggota PATBM dari 6 desa, dan 1.284 anggota tim SRA dari 13 sekolah.

Supported 218 PATBM members across 6 villages and 1.284 SRA team members from 13 schools.



Pendidik sebaya, anggota PATBM, dan tim SRA melalui pendekatan persuasif berhasil mencegah 20 kasus perkawinan anak.

Prevented 20 cases of child marriage through persuasive efforts by peer educators, PATBM members, and SRA teams.



13 sekolah telah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan total lebih dari 80 juta dalam mendukung dan mewujudkan SRA.

13 schools have allocated over IDR 80 million from the School Operational Assistance (BOS) fund to support and implement Child-Friendly School (CFS).



Sebanyak 6 PATBM telah mengalokasikan anggaran dari Dana Desa dengan total lebih dari 50 juta per tahun.

Six PATBM have allocated more than IDR 50 million annually from the Village Fund to support their activities.



60 *Youth Advocate* memasukan rekomendasi melalui Policy Brief Pencegahan Perkawinan Anak kepada pemerintah daerah.

Enabled 60 Youth Advocates to submit policy recommendations to local governments through a comprehensive Child Marriage Prevention Policy Brief.



Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan Perkawinan Anak (PPA), dan Surat Keputusan Tim Satuan Tugas (Satgas) PPA.

The West Lombok District Government issued a Regent's Ordinance/Regulation (Perbub) on the Regional Action Plan (RAD) for Child Marriage Prevention (PPA), along with a Decree establishing the PPA Task Force (Satgas).



Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) Pencegahan Perkawinan Anak (PPA), termasuk RAD PPA dan Surat Keputusan (SK) Tim Satuan Tugas (Satgas) PPA.

The Sukabumi District Government issued a Regent's Ordinance/Regulation (Perbub) on Child Marriage Prevention (PPA), including the RAD PPA and a Task Force (Satgas) Decree.



Sebanyak 5 desa telah mengeluarkan Peraturan Desa (PERDES) tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Five villages issued Village Regulations (Perdes) focused on Child Marriage Prevention.



Sebanyak 9 sekolah telah menyepakati Tata Tertib Sekolah yang Ramah Anak (Tatib SRA) dan berlaku untuk seluruh warga sekolah. Nine schools have agreed to adopt Child-Friendly School Regulations (Tatib SRA) that apply to the entire school community.



Mekanisme Alur Pelaporan dan Penanganan Kasus menjadi referensi dalam rujukan kasus kekerasan, terutama perkawinan anak bagi semua sekolah dan desa di 3 Kabupaten. Referral Mechanism for Reporting and Handling Cases are now actively used as a reference in addressing cases of violence, particularly child marriage, in schools and villages across the three districts.



Komitmen oleh sekolah dampingan (SMAN 1 Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi) untuk tidak ada peserta didik yang dikeluarkan dari sekolah apa pun alasannya. Sekolah ini juga berkomitmen melanjutkan diskusi serial HKSR dengan mengadopsi modul dan pendekatan *peer to peer education* sebagai bagian dari ekstrakurikuler sekolah. Achieved commitment from SMAN 1 Warung Kiara in Sukabumi District to ensure no students is expelled from school, regardless of their circumstances. The school has also committed to continuing SRHR serial discussions by adopting peer-to-peer education modules and approaches as part of its extracurricular activities.



Komitmen oleh sekolah dampingan (SMAN 1 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi) menerapkan sekolah terbuka bagi peserta didik yang AMPK (anak yang membutuhkan perlindungan khusus) agar tetap sekolah. SMAN 1 Sukaraja in Sukabumi District committed to providing an open school system for students in need of special protection (AMPK), ensuring their right to continue their education.



Komitmen oleh sekolah dampingan (SMAN 1 Lembar, Kabupaten Lombok Barat) menyediakan pembalut dan celana dalam pengganti bagi peserta didik perempuan yang mengalami menstruasi di sekolah agar peserta didik tetap nyaman bersekolah. SMAN 1 Lembar in West Lombok District pledged to provide sanitary pads and replacement undergarments for female students experiencing menstruation, ensuring their comfort and uninterrupted school attendance.

Daftar Singkatan

List of Abbreviations

BOS	Bantuan Operasional Sekolah School Operational Assistance
BPD	Badan Permusyawaratan Desa Village Consultative Body
DPPPA (DP3A)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Women Empowerment and Child Protection Office
HKSR	Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi Sexual and Reproductive Health Rights
KBM	Kegiatan Belajar Mengajar Teaching and Learning Activities
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia Indonesian Child Protection Commission
KPAD	Kelompok Perlindungan Anak Desa Village Child Protection Group
KPPAD	Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Regional Child Protection and Supervision Commission
KTD	Kehamilan Tidak Diinginkan Unintended Pregnancy
LPAD	Lembaga Perlindungan Anak Desa Village Child Protection Agency
MKKS	Musyawahar Kerja Kepala Sekolah School Principals' Working Group
MKM	Manajemen Kebersihan Menstruasi Menstrual Hygiene Management
Musrenbangdes	Musyawahar Perencanaan Pembangunan Desa Village Development Planning Meeting
OPD	Organisasi Perangkat Daerah Regional Apparatus Organization
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Integrated Service Center for Women's and Children's Empowerment

PATBM	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Community-Based Integrated Child Protection
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini Early Childhood Education
Perda	Peraturan Daerah Regional Ordinance/Regulation
Perdes	Peraturan Desa Village Ordinance/Regulation
Perbub	Peraturan Bupati Regent's Regulation
Pergub	Peraturan Gubernur Governor Ordinance/Regulation
PPA	Pencegahan Perkawinan Anak Child Marriage Prevention
RAD	Rencana Aksi Daerah Regional Action Plan
RAPBDes	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Village Revenue and Expenditure Budget Plan Draft
RKPDes	Rencana Kerja Pemerintah Desa Village Government Work Plan
SATGAS	Satuan Tugas Task Force
SRA	Sekolah Ramah Anak Child-Friendly School
TPKS	Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sexual Violence Crime
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah Regional Technical Implementation Unit

Daftar Isi

Table Of Contents

Kata Pengantar.....	ii
<i>Foreword</i>	
Capaian Program GEMA CITA.....	iv
<i>Key Achievements of the GEMA CITA Program</i>	
Daftar Singkatan.....	vii
<i>List of Abbreviations</i>	
Mengubah Pendekatan Melalui Pendidikan Hukum.....	3
<i>Transforming Approaches Through Legal Education</i>	
Romi dan Langkah Konkret Bagi Remaja	9
<i>Romi and Concrete Steps for Adolescents</i>	
Remaja Desa Penggerak Perubahan.....	15
<i>Young Changemaker from the Village</i>	
Cegah Kawin Anak, Cegah Cita-Cita Kandas	21
<i>Preventing Child Marriage, Saving Dreams</i>	
Dari Mimbar ke Masyarakat: Mencegah Perkawinan Anak Lewat Khotbah.....	29
<i>From the Pulpit to the Community: Preventing Child Marriage Through Friday Sermons</i>	
Pilar Perubahan di Sekolah Ramah Anak	35
<i>A Pillar of Change in The Child-Friendly School</i>	
Melalui Goresan Mural, Beraksi dalam Moral.....	41
<i>Creating Change Through Murals and Advocacy</i>	
Dari Ruang Kelas, Membawa Dampak Luas.....	47
<i>From the Classroom to a Wider Impact</i>	
Memperkuat Kolaborasi, Bersama Menangani Perkawinan Anak.....	57
<i>Strengthening Collaboration to End Child Marriage</i>	
Sinergi Edukasi dan Regulasi.....	63
<i>Aligning Education and Regulation</i>	
Mengurai Sengkarut Perkawinan Anak	71
<i>Untangling the Complexity of Child Marriage</i>	
Menggemakan Suara Remaja dan Kaum Muda	81
<i>Empowering Youth Voices for Lasting Change</i>	
Kaum Muda Berdaya, Kemenangan dari Timur Indonesia.....	87
<i>Empowering Youth: A victory from Eastern Indonesia</i>	
Dari Desa ke Desa, Berjuang Cegah Perkawinan Anak.....	93
<i>From Village to Village: A United Fight Against Child Marriage</i>	







Fira, salah satu *master trainer* dalam program GEMA CITA di Kabupaten Lombok Barat, NTB.
(Kredit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)

Fira, one of the master trainers in the GEMA CITA Program in West Lombok District, West Nusa Tenggara.
(Credit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)

MENGUBAH PENDEKATAN MELALUI PENDIDIKAN HUKUM

TRANSFORMING APPROACHES THROUGH LEGAL EDUCATION

Fira adalah seorang mahasiswi jurusan hukum di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ia mengawali perjalanannya sebagai 'advokat muda' sejak duduk di bangku SMA, melalui partisipasinya dalam program-program yang diadakan oleh Plan Indonesia. Saat ia berusia 17 tahun, Fira bergabung sebagai *master trainer* desa dalam Program Generasi Emas Bangsa Bebas Perkawinan Usia Anak (GEMA CITA).

Fira, a law student at University of Mataram, West Nusa Tenggara, began her journey as a youth advocate during high school through her participation in programs organized by Plan Indonesia. At just 17 years old, she became a village master trainer for the GEMA CITA (End Child Marriage) Program.



Fira (tengah), Romi (kanan) dan Yayak (kiri) berdiskusi mengenai rencana kegiatan dan aktivitas GEMA CITA yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. (Kredit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)
Fira (center), Romi (right), and Yayak (left) discuss the upcoming activities and plans for the GEMA CITA Program. (Credit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)



Fira mengendarai sepeda motornya berkeliling dusun untuk melakukan sosialisasi progam GEMA CITA di Kabupaten Lombok Barat. (Kredit: Alfian Romli/Yayasan Plan Internasional Indonesia)

Berbekal pengalamannya itu pula, Fira aktif mengadvokasi pencegahan perkawinan anak di desanya. Pengalaman ini juga menjadi alasan Fira mengambil jurusan hukum saat kuliah karena ia merasa perlu memiliki dasar pengetahuan yang kuat untuk mendukung langkah-langkah advokasinya. Sebagai *master trainer*, Fira bersama para anggota Organisasi Perangkat Desa (OPD) melatih para pendidik sebaya di desa dan di sekolah. Fira juga terlibat dalam mendampingi para pendidik sebaya saat mereka menyampaikan materi-materi dalam serial diskusi GEMA CITA terkait pencegahan perkawinan anak, khususnya tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR).

Tantangan dan Kecewaan

Kasus perkawinan anak di Lombok Barat cukup tinggi. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Giri Menang di Gerung, Mataram, tercatat 39 kasus dispensasi perkawinan anak pada tahun 2022. Angka ini kemudian meningkat menjadi 56 kasus pada tahun 2023. Namun, data ini hanya mencakup permohonan dispensasi yang dilaporkan, sehingga kemungkinan jumlah kasus sebenarnya jauh lebih besar.

Inspired by this experience, Fira now actively advocates against child marriage in her village, eventually inspiring her decision to pursue a degree in law. She realized that a solid legal foundation was crucial to supporting her advocacy work. As a master trainer, Fira worked closely with Village Government Officials (OPD), trained peer educators in both villages and schools, and also supported them in delivering sessions on child marriage prevention, with a focus on Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR).

Challenges and Setbacks

Child marriage rates in West Lombok remain alarmingly high. According to data from the Religious Court in Giri Menang, Mataram, 39 child marriage dispensations were recorded in 2022, rising to 56 cases in 2023. However, these numbers only represent reported cases, meaning the actual number of cases is likely much higher.

In this challenging environment, Fira, as a master trainer, along with the OPD team, successfully prevented four cases of child marriage in her



Fira rides her motorcycle around the village to conduct outreach for the GEMA CITA Program in West Lombok District, West Nusa Tenggara. (Credit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)

Di tengah situasi ini, Fira sebagai *master trainer*, bersama tim OPD lainnya berhasil mencegah empat kasus perkawinan anak di desanya. Tahap awal pencegahan biasanya dimulai dengan melibatkan komunikasi dan negosiasi intensif dengan keluarga yang terlibat. Jika pendekatan ini tidak berhasil, tim akan melanjutkan proses dengan melibatkan pemerintah desa, seperti kepala dusun, sekretaris desa, dan tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), serta tim Sekolah Ramah Anak (SRA), termasuk dukungan dari Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). “Bidan desanya juga ikut, jadi semua sektor di sana itu terlibat untuk mencegah,” jelas Fira.

Salah satu kasus yang paling Fira ingat adalah ketika ia harus mendampingi seorang anak perempuan ke Rumah Aman untuk mendapatkan bantuan psikologis. Dalam kasus ini, tim PATBM meminta Fira untuk membantu mencegah perkawinan anak tersebut. Bersama tim PATBM, Fira melakukan penjangkauan ke rumah orang tua anak perempuan di desanya dan selanjutnya ke rumah orang tua anak laki-laki di desa lain. Anak laki-laki itu ternyata masih sebaya dengan usia anak perempuan tersebut.

village. Prevention efforts often begin with intense communication and negotiation with the families involved. When these approaches fail, the team involves local authorities, including the village head, village secretary, Community-Based Child Protection (PATBM) team, Child-Friendly Schools (CFS) team, and support from the local community police (Bhabinkamtibmas). “The village midwife also steps in, so every sector is involved in prevention efforts,” Fira explained.

One of the cases that deeply impacted Fira was when she had to accompany a young girl who was taken to a Safe House for psychological support. The PATBM team had sought Fira’s help to prevent the girl’s marriage, which led them to negotiate with both the girl’s and the boy’s families. They visited the girl’s family in her village and then the boy’s family in another village. It turned out that the boy was the same age as the girl.

After long negotiations, both families agreed to cancel the wedding. However, this decision impacted the girl’s mental health, requiring her to stay at the Safe House for a week for psychological support.

Setelah negosiasi yang panjang, akhirnya keluarga dari kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan setuju untuk membatalkan rencana perkawinan anak-anak mereka. Namun, di satu sisi, keputusan ini berdampak pada kondisi mental anak perempuan tersebut, sehingga ia membutuhkan pendampingan psikologis di Rumah Aman selama seminggu. Situasi seperti ini sering terjadi dalam pencegahan perkawinan anak, terutama di Lombok. Hal ini berkaitan dengan tradisi *merariq* di mana anak perempuan sering dianggap membawa aib jika pernikahan dibatalkan.

Setelah menjalani pendampingan psikologis dan anak perempuan tersebut dianggap telah pulih dari segi mental, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPTDA) memutuskan untuk mengantarkan kembali anak perempuan tersebut ke rumah orang tuanya. Namun, siapa sangka, ketika kembali ke rumah, anak perempuan itu justru dinikahkan dengan anak laki-laki tersebut. Momen ini menjadi pukulan berat bagi Fira dan tim pencegahan perkawinan anak karena merasa *kecolongan*. Meski begitu, Fira terus berusaha agar anak tersebut kembali bersekolah dan melanjutkan pendidikannya.

Dengan latar belakang ilmu hukum yang saat ini tengah ditempuhnya, Fira kini lebih memahami bahwa undang-undang yang mengatur Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dapat digunakan untuk melindungi anak dalam kasus perkawinan anak. Sayangnya, penerapan undang-undang ini sering terkendala oleh norma adat setempat atau praktik premanisme yang justru mendukung perkawinan anak.

Dari Bangku Kuliah ke Kebijakan

Saat ini, di semester ketiga kuliahnya, Fira semakin memahami bahwa ada banyak strategi hukum yang dapat diterapkan untuk mencegah perkawinan anak. Pengalaman akademisnya memungkinkan Fira untuk memiliki perhatian lebih kepada kebijakan, dengan meninjau kembali Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), dan undang-undang lain terkait pencegahan perkawinan anak. Bersama 10 hingga 11 kaum muda lainnya, Fira aktif berdialog dengan pejabat pemerintah setempat—termasuk Bupati—untuk memberikan rekomendasi dan tinjauan terhadap peraturan yang ada, yakni

Situations like this are common in child marriage prevention, particularly in Lombok, where the tradition of *merariq* (elopement) is prevalent, canceling a wedding often causes girls to be viewed as a source of shame if a marriage is called off.

After receiving psychological support, the girl was returned to her family with the assistance of the local Women's and Children's Protection Unit (UPPTDA). Despite the team's best efforts, the girl was eventually married off once she returned home—a heartbreaking moment for Fira and the team, who felt blindsided by the situation. Still, Fira remained determined, working to ensure the girl could return to school and continue her education.

Through her legal studies she is currently pursuing, Fira has deepened her understanding of the Sexual Violence Crimes Law (TPKS) and its potential to protect children from child marriage. Unfortunately, local customs and informal practices often undermine these legal protections, making enforcement challenging.

From University to Policy

Now in her third semester, Fira has become increasingly aware of how legal frameworks can be leveraged to prevent child marriage. Her academic journey has shifted her focus toward policies, including reviewing Local Regulations (Perda), Regent Regulations (Perbup), and other laws related to child marriage prevention. Along with 10 to 11 other young advocates, Fira actively engages in dialogues with local government officials, including the Regent, to propose recommendations and review the existing regulations. These include the Regent's Regulation, which should be an extension of Lombok Barat District Regulation No. 9 of 2019 on the Legal Age for Marriage.

Fira and her peers hope that by August 2024, their legal reviews and recommendations will lead to tangible changes in the fight against child marriage.

Transforming in Thought and Action

Before joining the GEMA CITA Program, Fira's focus was primarily on addressing individual cases of child marriage in her village. However, her experience as a master trainer and her legal studies have broadened her perspective. She now sees child marriage

Peraturan bupati yang seharusnya merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan tersebut.

Fira dan rekan-rekannya berharap rekomendasi dan tinjauan terkait undang-undang tersebut akan rampung pada Agustus 2024 sehingga dapat membawa perubahan konkret dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Transformasi Pemikiran dan Aksi

Sebelum mengenal Program GEMA CITA, Fira selama ini hanya berfokus pada penanganan kasus perkawinan anak di desanya. Namun, setelah terlibat lebih dalam sebagai *master trainer* dan melanjutkan pendidikan hukumnya, pandangan Fira mulai berubah. Pengalaman dan pengetahuan yang didapatkannya memperdalam pemahamannya tentang rumitnya persoalan perkawinan anak sehingga membutuhkan upaya yang sistematis dan menyeluruh.

Awalnya, ia fokus pada intervensi langsung dalam melakukan penjangkauan dan edukasi kepada pendidik sebaya. Seiring bertambahnya pengalaman dan pengetahuannya, terutama dalam studi hukumnya, ia mulai melihat pentingnya pencegahan perkawinan anak yang lebih masif dan sistematis; tidak hanya melalui pendidik sebaya atau tim PATBM tetapi juga dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti polisi, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dan pemerintah desa.

“Pandangan saya sekarang lebih terbuka. Ternyata, banyak cara untuk mencegah perkawinan anak. Misalnya, dengan memanfaatkan kebijakan yang ada, seperti Perda, Perbup, dan undang-undang TPKS, dan mengajak elemen-elemen masyarakat untuk ikut menerapkannya,” ujar Fira.

Fira menyadari bahwa pendekatan yang lebih luas dan sistemik, serta memanfaatkan kerangka hukum yang ada sangatlah penting untuk menciptakan upaya pencegahan yang berkelanjutan. Pergeseran pemikiran dan sudut pandangnya ini kian menegaskan komitmen Fira untuk mengubah pendekatan komunitasnya dalam pencegahan perkawinan anak.

prevention as a systematic and multi-layered effort that goes beyond peer education.

Initially, Fira concentrated on direct interventions by providing outreach and education to peer educators. Over time, she recognized the need for a broader approach, one that involves not only peer educators or PATBM teams but also other key community elements such as the police, Bhabinkamtibmas, and village governments.

“My perspective has really expanded. It turns out there are so many ways to prevent child marriage. For example, by utilizing existing policies such as Perda, Perbup, and the TPKS Law, and encouraging community members to implement them,” Fira said.

Fira understands that adopting a wider, systemic approach while leveraging existing legal frameworks is essential to creating sustainable change in preventing child marriage. This transformation in her thinking and perspective has strengthened her commitment to transforming her community’s approach to preventing child marriage.



Fira menelpon teman-teman sesama pendidik sebaya. Mereka berdiskusi dan berbagi pandangan terkait isu perkawinan anak di desa masing-masing. (Kredit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)
Fira calls her fellow peer educators to discuss and exchange ideas on child marriage issues in their respective villages. (Credit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)



Romi, salah satu *master trainer* dalam program GEMA CITA di Kabupaten Lombok Barat
(Kredit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)

Romi, one of the master trainers in the GEMA CITA Program in West Lombok District.
(Credit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)

柔道

ROMI DAN LANGKAH KONKRET BAGI REMAJA

ROMI AND CONCRETE STEPS FOR ADOLESCENTS

Menurut Romi (19), masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh perubahan fisik, emosi, dan psikis, termasuk rasa ingin tahu yang besar. Rasa penasaran yang tinggi sering kali mendorong remaja untuk mencoba hal-hal baru tanpa mempertimbangkan dampaknya. Sebagai sesama remaja, Romi pun memahami hal ini.

For 19-year-old Romi, adolescence is a period of profound change—physically, emotionally, and psychologically—fueled by a deep curiosity. This curiosity can often lead young people to decisions made without fully considering the consequences. As a fellow teenager, Romi understands this well.



Romi (kanan) bersama Yayak memeriksa buku kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di teras Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Kabupaten Lombok Barat. Kredit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)
Romi (right) with Yayak review the Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) activity logbook on the porch of the Village Health Post (Pskesdes) in West Lombok District. (Credit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)



Daftar kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim PATBM di Kabupaten Lombok Barat. (Kredit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)

Romi adalah seorang pendidik sebaya di lingkungan desa di Kabupaten Lombok Barat. Sepintas, sosoknya tampak seperti remaja lainnya. Siapa sangka, di balik rambut ikalnya yang khas, Romi adalah remaja yang penuh semangat dan misi yang luar biasa.

Menurut Romi, remaja maupun teman-teman sepejabatannya memiliki rasa ingin tahu yang besar, termasuk tentang seksualitas. Namun, tanpa pengetahuan yang memadai tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), rasa penasaran itu bisa membawa risiko besar. Tanpa arahan yang tepat, remaja cenderung coba-coba hubungan seksual tanpa memahami konsekuensinya. Rasa penasaran ini bisa berujung pada Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) dan memicu perkawinan anak.

Ketika Romi mengenal Program Generasi Emas Bangsa Bebas Perkawinan Usia Anak (GEMA CITA), ia mendapatkan modul HKSR yang mengubah pandangannya. Ada banyak pengetahuan di dalam modul tersebut. Ia belajar lebih banyak tentang bagaimana melindungi diri dari perilaku berisiko yang tidak perlu. Bagi Romi, mempelajari HKSR sama pentingnya dengan pelajaran lain di sekolah. Pemahaman tentang HKSR dapat mencegah perkawinan anak. Karenanya, menjadi pendidik sebaya adalah satu hal yang ia senangi karena ia

Romi is a peer educator in a village in West Lombok District. At first glance, he seems like any other teenager, but behind his signature curly hair is a young man with boundless energy and a remarkable mission.

According to Romi, teenagers and his peers naturally have great curiosity, especially when it comes to sexuality. But without proper knowledge on Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR), that curiosity can lead to risky behaviours. Without guidance, young people might engage in sexual relationships without considering the consequences, which can result in unwanted pregnancies (KTD) and trigger child marriages.

When Romi first encountered the GEMA CITA (End Child Marriage) Program, he was introduced to the SRHR module, which transformed his perspective. He gained valuable insights into how to protect himself from risky behaviours and saw how essential SRHR education is, not just preventing child marriage but for empowering young people to make informed decisions. Being a peer educator felt like a natural role for Romi, allowing him to pass on the knowledge he had gained to his friends and other young people in the village.



The list of activities carried out by the Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) team in West Lombok District. (Credit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)

bisa menyebarkan pengetahuan HKSR pada teman-temannya dan remaja lainnya di desa.

Mengubah Penasaran Menjadi Pemahaman

Romi menyadari bahwa teman-teman seusianya di desa masih minim pengetahuan tentang HKSR, apalagi dampak perkawinan anak. Sebagai pendidik sebaya yang berada di bawah koordinasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Romi memiliki tanggung jawab untuk membekali remaja dengan pengetahuan HKSR melalui program-program desa, seperti Posyandu Remaja. Di sekolah, ia berkoordinasi dengan tim Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk menjalankan peran yang sama.

Perannya tidak berhenti di situ, Romi juga berperan aktif dalam menangani kasus kekerasan dan mencegah perkawinan anak di desanya. Misalnya, dalam satu kasus saat Romi dan tim PATBM menerima laporan dari kepala dusun dan warga setempat yang memergoki pasangan remaja yang melakukan hubungan seksual dan pihak keluarga perempuan bersikeras menikahkan anak mereka. Romi beserta tim PATBM dan tokoh masyarakat segera melakukan penjangkauan dan mediasi dengan keluarga remaja tersebut. Dalam kasus ini, Romi dilibatkan karena kemampuannya untuk berbicara langsung dengan

Turning Curiosity into Understanding

Romi noticed that many of his peers in the village had little knowledge about SRHR, let alone the consequences of child marriage. As a peer educator under the coordination of the Community-Based Child Protection (PATBM), Romi took on the responsibility of sharing SRHR knowledge through village programs such as the Youth Posyandu. At school, he coordinated with the Child-Friendly School (CFS) team to continue his role.

But Romi's role didn't stop there. Romi also became actively involved in responding to cases of violence and preventing child marriages in his village. For example, in one case, Romi and the PATBM team received a report from the village head and local residents who caught a teenage couple engaging in sexual activity. The girl's family insisted on marrying her off. Romi, along with the PATBM team and local community leaders, immediately intervened, mediating with the families involved. In this case, Romi's role was crucial due to his ability to speak directly to the teenagers from a peer's perspective, helping them understand the risks and consequences of their actions and encouraging them to consider their futures.

para remaja dari sudut pandang yang sama. Ia bisa memberikan pemahaman yang lebih baik kepada remaja tersebut tentang risiko dan dampak dari tindakan mereka, serta mendorong mereka untuk mempertimbangkan masa depan mereka.

Dengan pendekatan sebagai sesama remaja, dari percakapan tersebut, Romi memahami bahwa rasa penasaran remaja laki-laki tersebut terhadap seksualitas menjadi dorongan utama di balik tindakannya tanpa menyadari konsekuensi dari tindakannya. Romi pun kemudian menjelaskan pada remaja laki-laki tersebut tentang dampak yang bisa terjadi jika mereka memutuskan untuk melanjutkan perkawinan anak, seperti putus sekolah dan dampak ekonomi yang akan mereka hadapi di masa depan. Percakapan ini membantu Romi memahami bahwa tanpa pengetahuan yang memadai, rasa ingin tahu seperti ini dapat memicu keputusan berisiko; bahwa rasa penasaran remaja perlu diimbangi dengan edukasi agar tidak menuntun pada keputusan yang salah.

“Kamu, kita, masih muda dan memiliki perjalanan yang sangat panjang,” ujar Romi kepada remaja laki-laki dalam kasus tersebut.

Membangun Kesadaran

Setelah mengikuti pelatihan, mendapatkan pengetahuan tentang HKSR dan dampak perkawinan anak, serta berkaca dari pengalamannya sebagai pendidik sebaya saat menemui kasus perkawinan anak, Romi sekarang menjadi lebih peka dan aktif dalam mengatasi masalah-masalah ini. Bahkan Romi kini terlibat langsung, melakukan penjangkauan bersama tim PATBM, dan terus mengedukasi pemahaman HKSR pada remaja dan kaum muda.

Dari pengalaman ini, Romi tidak hanya menjadi lebih berpengetahuan tetapi juga lebih proaktif. Romi juga kerap meyakinkan teman-temannya untuk ikut serta dalam kegiatan edukasi HKSR; bahwa kegiatan pelatihan tersebut disampaikan dengan metode yang menarik. Romi percaya bahwa belajar tidak harus selalu serius; harus ada momen-momen yang menyenangkan untuk memotivasi para remaja. “Kita kayak melakukan *ice breaking* gitu. Itu juga yang salah satunya menurut saya sih mungkin jadi motivasi mereka. Belajar itu nggak harus serius,” ujar Romi.

As a fellow teenager, Romi approached the boy involved. Romi realized that the boy’s actions were driven by the curiosity about sexuality, without any awareness of the consequences. Romi then explained to the boy the potential impact of child marriage—such as dropping out of school, facing economic struggles, and losing opportunities for a better future. This conversation helped Romi see even more clearly that adolescent curiosity could lead to risky decisions; adolescent curiosity needs to be balanced with education to prevent poor decisions.

“You and I—we’re still young, with our whole lives ahead of us,” Romi told the boy.

Building Awareness

After undergoing training and gaining knowledge about SRHR and the impacts of child marriage, as well as reflecting on his experience as a peer educator encountering child marriage cases, Romi has become more aware and committed in addressing these issues. He now takes an active role in community outreach with the PATBM team, continuing to educate young people about SRHR and the importance of making informed choices.

This experience not only deepened Romi’s knowledge but also made him more proactive. He regularly encourages his friends to join SRHR education activities, emphasizing that learning can be fun and engaging. Romi believes that learning doesn’t always have to be serious; there should be enjoyable moments to motivate young people. “We do things like ice-breaking activities. I think that might be one of the things that motivates them. Learning doesn’t always have to be serious,” Romi explained.

For Romi, these experiences have been informative. Armed with knowledge and a commitment to his community, he believes that any teenager can become an agent of change within their community.

Pengalaman-pengalaman ini menjadi momen transformasi penting bagi Romi. Bahwa dengan pengetahuan dan komitmen, seorang remaja bisa menjadi agen perubahan di komunitasnya.



Romi (duduk) dan Yayak (berdiri) membaca buku materi Program GEMA CITA.
(Kredit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)
Romi (seated) and Yayak (standing) read the GEMA CITA Program materials.
(Credit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)



Nanda, salah satu pendidik sebaya dalam program GEMA CITA di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
(Kredit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)
Nanda, one of the peer educators in the GEMA CITA Program in Nagekeo District, East Nusa Tenggara.
(Credit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)

REMAJA DESA

PENGGERAK PERUBAHAN

YOUNG CHANGEMAKER FROM THE VILLAGE

Nanda (17) awalnya adalah remaja yang pemalu. Kehidupannya dulu terbatas pada rutinitas sekolah dan membantu orang tua di rumah. Sosoknya yang pemalu terkadang membuatnya jarang mengikuti beberapa kegiatan di desanya, di Desa Nangadhero, Kabupaten Nagekeo.

Nanda (17) used to be a shy teenager. Her life revolved around school and helping her parents at home. Her reserved nature often kept her from participating in various activities in her village, Nangadhero Village, in the Nagekeo District.

“Dulu, tuh, mudah gugup dan kurang percaya diri. Kalau ada kegiatan dan disuruh untuk memimpin doa saja, saya gemetar karena tidak biasa omong,” kenangnya sambil tertawa mengingat masa lalu.

Adalah sang mama yang selalu mendorongnya untuk lebih aktif mengikuti beberapa kegiatan. “Kadang, kalau terlalu capek dari sekolah, baru pulang sekolah, mama sering beri tahu, nanti tuh ada kegiatan di sini, kau harus ikut,” ujar Nanda menirukan ucapan mamanya.

Di desanya memang ada beberapa kegiatan, tetapi tidak banyak melibatkan kaum muda. Banyak anak muda seperti Nanda, yang selain bersekolah juga harus membantu orang tua di rumah. “Kalau teman-teman seusia saya, tuh, ada yang jadi sopir oto, terus ada yang jadi nelayan muda, ada yang bergabung di kegiatan Orang Muda Katolik, remaja masjid, tapi ada juga beberapa teman saya yang sudah menikah,” cerita Nanda, mengungkapkan situasi yang dihadapi oleh remaja di desanya.

Pada saat itu, Nanda tidak begitu mengerti tentang kegiatan-kegiatan untuk remaja dan kaum muda, apalagi tentang perkawinan anak dan dampaknya. “Di desa saya, sebelum tahun 2022 tuh, kasus perkawinan anak sangat banyak, dan ada juga

“I used to get nervous easily and lacked confidence. Even being asked to lead a prayer would make me tremble because I wasn’t used to speaking,” Nanda recalled with a laugh, remembering her earlier days.

It was her mother who constantly encouraged her to be more involved in activities. “Sometimes, even when I was tired after school, as soon as I got home, my mom would say, ‘There’s an activity coming up, you should join,’” Nanda said, mimicking her mother’s words.

Though there were some activities in her village, few were aimed at young people. Many youths, like Nanda, balanced school with helping their families at home. “Some of my friends worked as drivers or young fishermen, others joined the Catholic Youth or the mosque youth groups. But I also had friends who were already married,” Nanda reflected, sharing the reality for many teenagers in her village.

At that time, Nanda didn’t understand much about youth activities, let alone the consequences of child marriage. “In my village, before 2022, child marriage was common. Some of my friends had already married,” Nanda said. Even as early as



Nanda dan Claren, rekan sesama pendidik sebaya, mencatat hasil diskusi dengan para warga di Kabupaten Nagekeo saat melakukan sosialisasi tentang Program GEMA CITA dan pencegahan perkawinan anak.

(Kredit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)

Nanda and Claren, fellow peer educators, take notes from a discussion with local residents in Nagekeo District during outreach on the GEMA CITA Program and child marriage prevention. (Credit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)

teman-teman yang sudah menikah,” ujar Nanda. Bahkan, sejak nanda masih duduk di kelas 6 SD, sekitar tahun 2017-2018, dia mulai menyadari beberapa temannya sudah menikah.

“Waktu itu saya cuma berpikir... lh, ini kan seumuran saya... dua atau tiga tahun di atas saya tapi kok sudah menikah,” kata Nanda. Nanda seperti terkenang tentang kondisi remaja di desanya. “Waktu itu, semua seperti berlomba-lomba, begitu. Satu kawan baru menikah, nanti dua atau tiga bulan kemudian ada lagi. Bahkan pernah, dua minggu kemudian sudah ada yang menikah,” tutur Nanda menambahkan.

Menggali Potensi Melalui MAPAN dan GEMA CITA

Transformasi Nanda bermula ketika ia bergabung dengan Program Meraih Masa Depan (MAPAN) pada tahun 2020. Program ini, yang diinisiasi oleh Plan Indonesia, memperkenalkannya tentang kampanye sosial dan beragam kegiatan serta pelatihan sebagai pendidik sebaya (*peer*

sixth grade, around 2017-2018, Nanda began noticing her peers getting married.

“I used to think, ‘Wow, they’re my age, or maybe two or three years older, and they’re already married,’” Nanda recalled. “Back then, it felt like a competition. One friend would get married, and then two or three months later, others would follow. Sometimes, it happened just two weeks apart,” she added.

Discovering Her Potential through MAPAN and GEMA CITA

Nanda’s transformation began in 2020 when she joined the MAPAN (Meraih Masa Depan/Achieving the Future) Program, an initiative by Plan Indonesia. Through the program, she was introduced to social campaigns, peer educator training, and various activities that opened her eyes to new skills and knowledge, rarely discussed in school or among her peers. This marked the beginning of her journey towards greater personal growth.

educator). Nanda belajar berbagai keterampilan dan pengetahuan yang jarang dibahas di sekolah dan jarang dibahas di kalangan seusianya. Ini menjadi titik awal perjalanannya menuju perubahan diri yang lebih besar.

Ketika Program GEMA CITA hadir di desanya pada bulan November 2023, Nanda terpilih sebagai salah satu dari 20 remaja yang mengikuti Program GEMA CITA. Program ini membawanya mulai berfokus pada pencegahan perkawinan anak maupun tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), termasuk memperkenalkannya pada berbagai regulasi yang mendukung pencegahan perkawinan anak. “Di GEMA CITA, kami belajar membedah peraturan perundang-undangan yang mendukung pencegahan perkawinan anak. Ada Perda, Perbub, sampai Perdes. Di situ saya kaget sekali karena saya baru tahu ada undang-undangnya,” kata Nanda.

Pengetahuan ini membuka wawasan Nanda tentang betapa luas dan terpadunya upaya pencegahan perkawinan anak di berbagai tingkatan pemerintah. Ia pun mulai menyadari bahwa perubahan tidak hanya terjadi di tingkat individu tetapi juga memerlukan dukungan dari kebijakan yang ada.

Dari Pemalu Menjadi Pemimpin

Seiring waktu, Nanda tidak hanya mendapatkan pengetahuan tetapi juga kepercayaan dirinya yang mulai tumbuh. Program-program seperti MAPAN dan GEMA CITA telah melatihnya untuk mulai berani menyampaikan pendapat dan berbicara lebih banyak di depan umum. Sesuatu yang sebelumnya ia takuti. “Saya juga jadi belajar banyak hal, tapi yang menarik, tuh, saya jadi belajar tentang *public speaking*. Saya jadi belajar berani tampil dan mencari akar permasalahan ketika melihat suatu isu,” papar Nanda.

Keberanian dan rasa percaya diri ini membawa Nanda melangkah lebih jauh. Ia mulai berinisiatif berbicara di depan kelas tentang pencegahan perkawinan anak. “Kalau waktu jam kosong dan guru belum datang, pasti saya tuh maju ke depan. Saya cerita ke teman-teman tentang hak-hak anak, perkawinan anak, terus tentang menyiapkan masa depan kita,” kata Nanda penuh antusias. Sosialisasi di kelas ini, murni inisiatifnya sendiri. Beberapa

When the GEMA CITA (End Child Marriage) Program launched in her village in November 2023, Nanda was selected as one of 20 young participants. The program focused on preventing child marriage and promoting Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR), while also introducing her to regulations supporting child marriage prevention. “Through GEMA CITA, we learned about local, provincial, and national laws that help prevent child marriage. I was shocked because I had no idea these laws existed,” Nanda said.

This newfound knowledge broadened Nanda’s perspective on how coordinated efforts across different levels of government could help prevent child marriage. She realized that lasting change requires both individual action and policy support.

From Shy Girl to Leader

Over time, Nanda not only gained knowledge but also developed her confidence. Programs like MAPAN and GEMA CITA taught her to speak up and express her thoughts in public, something she once feared. “I learned a lot, but public speaking was the most valuable. I learned to be brave, to step forward when I see an issue,” Nanda explained.

Her newfound courage led her to take the initiative in discussing child marriage prevention with her classmates. “Whenever there was free time and the teacher hadn’t arrived, I would stand up and talk to my friends about children’s rights, child marriage, and the importance of planning for our future,” Nanda said with enthusiasm. This classroom advocacy was entirely her own initiative, and soon one by one, her classmates began asking questions, and after GEMA CITA sessions, her friends would gather around her, eager to learn more.

Nanda’s abilities and knowledge were soon recognized by her peers, who elected her as Chair of the Nangadhero Village Children’s Forum (FORADES). The selection process was competitive. Nanda competed with 18 other FORADES members (15 girls and 3 boys), each presenting their vision and mission. She vividly recalls preparing her vision statement, which she presented in front of everyone at the village office,

teman di kelasnya satu persatu mulai sering bertanya. Tak jarang, jika Nanda usai mengikuti kegiatan GEMA CITA, ia dikelilingi kawan-kawannya yang antusias bertanya.

Kemampuan dan pengetahuan yang Nanda miliki akhirnya diakui oleh teman-temannya, yang kemudian memilihnya sebagai Ketua Forum Anak Desa (FORADES) Nangadhero. Proses pemilihan ini tidak mudah. Nanda harus bersaing dengan 18 anggota FORADES lainnya (15 perempuan dan 3 laki-laki), serta saling memaparkan visi dan misi masing-masing. Nanda teringat momen-momen awal ketika harus menyiapkan visi-misi untuk menjadi Ketua FORADES. Saat itu ia harus membuat visi dan misi dan memaparkannya di kantor desa di depan semua peserta dan Field Development Officer (FDO) Plan Indonesia.

Visi yang Nanda usung adalah menjadikan FORADES sebagai wadah untuk pemecahan masalah perkawinan anak. “Saya teringat, waktu saya masih SMP, kalau saya hitung-hitung, saat itu sudah ada 7 perkawinan anak di desa saya. Dan di FORADES itu, kami rutin mengadakan pertemuan sebulan sekali di mana kami masing-masing membahas isu-isu yang ada di desa masing-masing. Menurut saya, isu ini penting. Jadi, saya bawa ini ke dalam visi-misi saya,” ucap Nanda. Siapa sangka, visi dan misinya untuk mencegah perkawinan anak rupanya membawanya menjadi Ketua FORADES. Di tahun 2024 ini adalah tahun kedua ia menjadi Ketua FORADES.

Sebagai ketua, Nanda aktif mengajak teman-teman remaja untuk berdiskusi dan belajar bersama tentang pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang. Ia kembali berujar, “Harapannya, saya ingin teman-teman saya juga tahu bahwa kita bisa melakukan banyak hal sebelum menikah, kita bisa mengejar mimpi kita.”

Setelah aktif dalam Program MAPAN dan GEMA CITA, hingga ia menjadi Ketua FORADES, Nanda mulai sering diundang oleh Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) untuk berbagi pandangannya dari perspektif anak muda. Undangan ini datang setelah Nanda saat itu menyampaikan pendapatnya tentang pergaulan sehat dan pencegahan perkawinan anak dalam rapat orang tua yang kebetulan dihadiri oleh Ketua KPPAD.

including Plan Indonesia’s Field Development Officer (FDO).

Nanda’s vision was to make FORADES a platform for tackling child marriage. “I remembered that when I was in junior high school, seven of my peers had already married in my village. At FORADES, we have monthly meetings to discuss issues in each village. To me, child marriage was a top concern for me, so I included it in my vision,” Nanda explained. Her vision for preventing child marriage ultimately led to her election as Chair of FORADES, a role she has held since 2022.

As Chair, Nanda actively encourages her peers to discuss and learn about the importance of delaying marriage until they are older enough. “My hope, I want my friends to understand that there’s so much we can achieve before marriage. We still have time to chase our dreams,” she said.

Through her involvement in MAPAN and GEMA CITA and as Chair of FORADES, Nanda began receiving invitations from the Regional Child Protection and Monitoring Commission (KPPAD)



Ketika KPPAD mendengar betapa pentingnya perspektif anak muda dalam diskusi ini, mereka melihat potensi besar dalam diri Nanda dan rekan-rekannya. “Setelah itu, setiap ada sosialisasi di desa, Ketua KPPAD pasti undang saya untuk membawa materi,” ujar Nanda penuh rasa bangga.

Momen ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan Nanda. Dia beralih dari seorang peserta menjadi pemimpin muda yang berbagi pengetahuan, terutama tentang pencegahan perkawinan anak, kepada para orang tua dan tokoh masyarakat di desanya. “Mengubah pola pikir orang tua dan remaja memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Edukasi harus terus dilakukan agar membantu meringankan tantangan yang dihadapi kaum muda,” tegasnya.

Perjalanan ini masih panjang. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, saat Nanda masih duduk di bangku SMP, kini ia merasa sedikit bangga. Dari November 2023 hingga pertengahan tahun 2024, ia tidak lagi melihat adanya kasus perkawinan anak di desanya.

to share her insights from a youth perspective. This started after she spoke about healthy relationships and child marriage prevention at a parent meeting, where the KPPAD Chair happened to be present.

Recognizing the value of a youth perspective, the KPPAD saw great potential in Nanda and her peers. “Now, whenever there’s a village outreach event, the KPPAD Chair always invites me to present the material,” Nanda said with pride.

This moment marked a pivotal point in Nanda’s journey—from participant to young leader, sharing her knowledge about child marriage prevention with both parents and community leaders in her village. “Changing the mindset of both parents and teenagers isn’t easy. Continuous education is key to addressing the challenges young people face,” Nanda emphasized.

The journey is ongoing. Compared to a few years ago, when Nanda was in junior high school, she now feels a sense of pride. Since November 2023, up until mid-2024, she hasn’t seen any cases of child marriage in her village.



Nanda berbagi informasi dan pengetahuan tentang pencegahan perkawinan anak pada sejumlah remaja, kaum muda, dan warga di Kabupaten Nagekeo. (Kredit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)
Nanda shares information and knowledge on child marriage prevention with teenagers, youth, and community members in Nagekeo District. (Credit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)



Resi, salah satu pendidik sebaya dalam program GEMA CITA oleh Plan Indonesia di Kabupaten Sukabumi. (Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)
Resi, a peer educator in the GEMA CITA Program by Plan Indonesia in Sukabumi District, West Java (Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)

CEGAH KAWIN ANAK, CEGAH CITA-CITA KANDAS

PREVENTING CHILD MARRIAGE, SAVING DREAMS

Hidup dan besar di sebuah desa di Kabupaten Sukabumi, Resi (19) tumbuh di lingkungan pabrik dengan deru mesin pabrik dan aroma kesibukan yang tak pernah berhenti. Resi sering kali menyaksikan teman-teman seusianya, yang bahkan masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, terjebak dalam perkawinan anak. Di lingkungan tempat tinggalnya, perkawinan anak seolah menjadi hal yang lumrah, meskipun Resi tahu ada mimpi-mimpi yang harus dikorbankan dan hak-hak anak yang dirampas.

Growing up in a village in Sukabumi, Resi (19) was surrounded by the constant hum of factory machines and the bustle of industrial life. She often witnessed her peers, some still in middle school, being drawn into child marriages. In her community, child marriage was all too common, even though Resi knew the heavy price it exacted—lost dreams and violated children’s rights.



Sejumlah kaum muda memasang poster kampanye Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di sekolah mereka yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. (Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)
A group of young people put up posters for the Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) campaign at their school in Sukabumi District, West Java. (Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)

Ketika Resi bergabung menjadi pendidik sebaya dalam Program Generasi Emas Bangsa Bebas Perkawinan Usia Anak (GEMA CITA), ia mendapatkan kabar Kartika (bukan nama sebenarnya), teman sepermainannya, dilamar oleh pacarnya. Dengan ilmu yang Resi dapatkan mengenai Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dan dampak perkawinan anak, Resi mendorong Kartika dan mendampingi Kartika berbicara dengan orang tuanya, mencoba meyakinkan dan meminta orang tuanya untuk membatalkan pernikahan yang sudah direncanakan. Resi tahu bahwa Kartika tidak menginginkan untuk menikah.

“*Kayak*, aduh saya harus *ngasih* tahu teman saya, nih, tentang bahaya perkawinan anak supaya dia *gak* jadi nikah. Tapi itu akan melanggar privasi dia,” Resi merenung panjang.

Berbekal pengetahuan terkait dampak-dampak perkawinan anak yang ia pahami, Resi memutuskan untuk bertindak. “Lebih baik saya mencegah perkawinan anak yang terjadi pada Kartika secepat mungkin,” ujar Resi.

When Resi became a peer educator with the GEMA CITA (End Child Marriage) Program, she learned that her childhood friend, Kartika (not her real name), had been proposed to by her boyfriend. Armed with the knowledge she had gained about Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) and the harmful effects of child marriage, Resi felt she couldn't just stand by. She encouraged Kartika to talk to her parents and accompanied her, trying to convince them to call off the arranged marriage. Resi knew that Kartika didn't want to get married.

“I thought to myself, ‘I have to tell my friend about the dangers of child marriage so she doesn't go through with it. But I was worried it might invade her privacy,’” Resi pondered.

Though hesitant, Resi decided to act on what she had learned about the consequences of child marriage. “It's better to prevent Kartika's marriage as early as possible,” she said.

With the advocacy skills she had gained as a peer educator, Resi supported Kartika in having



Sejumlah kaum muda mengikuti dialog mengenai Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di sekolah mereka, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. (Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)

A group of young people participate in a dialogue about the Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) at their school in Sukabumi District, West Java. (Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)

Resi dengan bekal advokasi yang telah didapatkannya sebagai pendidik sebaya mendukung dan mendampingi Kartika untuk berdiskusi terbuka dengan orang tuanya; tentang kekerasan verbal yang dialami Kartika, serta penolakan pada rencana pernikahan yang akan terjadi.

Meski sebelumnya proses seserahan sudah dilakukan, orang tua Kartika akhirnya menerima dan menghormati keputusan Kartika. Dengan dukungan penuh, Kartika dan keluarganya mengembalikan seserahan kepada pihak laki-laki dan menolak untuk terjadi perkawinan anak.

Usai peristiwa pembatalan pernikahan itu, hari-hari berikutnya, Kartika mengambil langkah baru dalam hidupnya. Ia kembali melanjutkan sekolah dan kemudian bekerja di salah satu pabrik di Jakarta. Kini, Kartika tidak hanya memiliki penghasilan sendiri, tetapi juga mampu mendukung finansial keluarganya. Impian yang pernah kandas, kini mulai terwujud.

Refleksi dan Realitas

Pelatihan selama lima hari dan 18 sesi diskusi yang Resi fasilitasi untuk teman-temannya sejak tahun 2022 ketika ia terlibat dalam Program GEMA CITA, telah membuka matanya terhadap realitas yang dihadapi remaja di lingkungannya. Menurutnya, isu perkawinan anak sangat relevan dengan kehidupan teman-temannya dan lingkungan di mana Resi tinggal. Isu perkawinan anak bukanlah sekadar topik yang sering dibahas dalam diskusi, melainkan kenyataan pahit yang ia saksikan sendiri.

Banyak teman-temannya yang sudah melalui perkawinan anak sejak SMP, tetapi pernikahan itu tidak bertahan lama dan menghadapi tantangan finansial. Dalam beberapa perjumpaan dengan teman-temannya tersebut, Resi mendengar sendiri penyesalan yang terlontar dari mulut mereka, tentang cita-cita yang kandas, cita-cita yang kini terasa jauh dari jangkauan.

Kenyataan pahit yang ia lihat dan pengalaman mendampingi Kartika, tidak hanya mengubah hidup Kartika, tetapi juga cara pandang Resi. Resi menyadari betapa pentingnya peran advokasi yang ia lakukan, terutama dalam mencegah perkawinan anak yang merenggut masa depan teman-temannya. Dan Resi memulai dari yang

an open conversation with her parents about the verbal abuse she was experiencing and her desire to call off the arranged marriage.

Although the dowry exchange had already taken place, Kartika's parents eventually respected her decision. With their full support, Kartika and her family returned the dowry to the groom's family, and the child marriage was prevented.

After the marriage was called off, Kartika began a new chapter in her life. She returned to school and later secured a job at a factory in Jakarta. Now, Kartika not only earns her own income but also supports her family financially. Dreams that once seemed out of reach began to take shape again.

Reflection and Reality

The five-day training and 18 discussion sessions that Resi facilitated for her peers, starting in 2022 as part of the GEMA CITA Program, opened her eyes to the harsh realities young people face in her community. For her, child marriage wasn't just a subject for discussion—it was a daily reality that she saw unfolding around her.

Many of her friends had married while still in middle school, only to see their marriages fall apart, leaving them struggling financially. In brief encounters with those friends, Resi heard their regret—how their once-bright futures now seemingly closed off.

Witnessing these struggles, combined with her experience supporting Kartika, not only changed Kartika's life but also shifted Resi's perspective. She realized how crucial her role was; that her advocacy could change lives by preventing child marriage from stealing the futures of her peers. Resi began her advocacy in the environment she knew best—the community where she grew up.

While Kartika has started a new chapter in her life, Resi's dedication to preventing child marriage has never faded. The experiences and knowledge she gained through GEMA CITA have become a part of her, fueling her commitment to stay active in her community. Even though the GEMA CITA Program has ended, Resi remains committed to continuing her advocacy, using her skills to educate and support other young people who are still at risk of



Resi membuat poster saat sesi diskusi mengenai Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di Kabupaten Sukabumi. Poster-poster ini digunakan saat sosialisasi dan advokasi terkait HKSR. (Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)
Resi creates a poster during a discussion session on Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) in Sukabumi District. These posters are typically used during outreach and advocacy related to SRHR. (Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)

terdekat, dari lingkungan di mana ia tumbuh dan mengenal setiap sudutnya.

Kini, Kartika telah menjalani lembaran baru dalam hidupnya tetapi semangat Resi untuk mencegah perkawinan anak tidak pernah pudar. Pengalaman dan pengetahuan yang ia dapatkan selama Program GEMA CITA telah menjadi bagian dari dirinya, mendorongnya untuk terus aktif dalam komunitas. Meskipun Program GEMA CITA telah berakhir, Resi bertekad untuk melanjutkan perjuangannya, menggunakan keterampilan advokasi yang telah ia pelajari untuk menyampaikan edukasi dan dukungan kepada teman-temannya yang masih berisiko mengalami perkawinan anak, agar tak ada lagi perkawinan anak di desanya atau di kalangan teman-temannya.

Dengan atau tanpa program, Resi memahami bahwa perubahan dimulai dari keberanian untuk berbicara dan mendampingi mereka yang membutuhkan.

child marriage. She is determined to ensure that no more of her friends or neighbors fall victim to this harmful practice.

With or without a formal program, Resi understands that real change begins with the courage to speak up and stand by those who need support.



Resi dan rekan-rekannya sesama pendidik sebaya membuat poster saat sesi diskusi mengenai Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di Kabupaten Sukabumi. (Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)
Resi and her fellow peer educators create a poster during a discussion session on Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) in Sukabumi District. (Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)







Habibi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD) Kuripan Utara, Kabupaten Lombok Barat.
(Kredit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)

Habibi, the Chairperson of the Village Child Protection Agency (LPAD) in Kuripan Utara, West Lombok District.
(Credit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)

DARI MIMBAR KE MASYARAKAT: MENCEGAH PERKAWINAN ANAK LEWAT KHOTBAH

FROM THE PULPIT TO THE COMMUNITY: PREVENTING CHILD MARRIAGE THROUGH FRIDAY SERMONS

Habibi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD) di Desa Kuripan Utara, Lombok Barat, memiliki pendekatan unik untuk mencegah perkawinan: melalui khotbah Jumat. Sejak ditunjuk sebagai Ketua LPAD di desanya pada tahun 2021, Habibi telah terlibat dalam usaha-usaha penghapusan perkawinan anak dan berbagai upaya perlindungan anak.

Habibi, the head of the Village Child Protection Agency (LPAD) in North Kuripan, West Lombok, has adopted a unique approach to preventing child marriage: utilizing Friday sermons. Since being appointed as the head of LPAD in 2021, Habibi has been actively involved in eliminating child marriage and advancing child protection initiatives in his community.

Habibi telah aktif dalam Program Generasi Emas Bangsa Bebas Perkawinan Usia Anak (GEMA CITA) sejak tahun 2022. Ketika GEMA CITA diluncurkan, Habibi ikut melakukan sosialisasi melalui Diskusi Kelompok Terarah (FGD) yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, maupun tokoh pemuda masyarakat. Dalam diskusi-diskusi ini, mereka membahas mengenai perlindungan anak, termasuk perkawinan anak dan kekerasan terhadap anak. Peserta FGD ini pada umumnya adalah khatib-khatib yang juga memberikan ceramah. Alhasil Habibi dan LPAD menyampaikan materi-materi mengenai perlindungan anak bisa menjadi tema atau topik ceramah dalam khotbah Jumat mereka.

Awal mula strategi melibatkan tokoh-tokoh agama muncul dari keterbatasan dana yang dimiliki LPAD. Pasalnya, LPAD memiliki anggaran yang minim untuk dana operasional. Menghadapi kondisi tersebut, Habibi memilih pendekatan ke masyarakat melalui khotbah Jumat dan Safari Ramadan. Habibi

has been involved in the GEMA CITA (End Child Marriage) Program since 2022. When GEMA CITA was launched, he participated in outreach efforts through Focus Group Discussions (FGDs) with local religious leaders, community elders, and youth. These discussions tackled various child protection issues, including child marriage and violence against children. Many of the participants were also Friday sermon preachers (*khatibs*), which led Habibi and LPAD to propose incorporating child protection topics into their sermons.

The idea of involving religious leaders stemmed from LPAD's limited operational budget. Facing financial constraints, Habibi turned to Friday sermons and Ramadan Safari activities as a way to reach the community. He approached local religious leaders who regularly preached after the Maghrib prayer, while the congregation waited for *Isya* and *Tarawih*.



Habibi mengerjakan laporan yang berkaitan dengan Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD) Kuripan Utara.
(Kredit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)
Habibi works on a report related to the Village Child Protection Agency (LPAD) in Kuripan Utara, West Lombok District.
(Credit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)

pun menemui tokoh agama yang terbiasa menjadi penceramah setelah magrib berjamaah, sembari menunggu waktu Isya dan tarawih.

Strategi ini terbukti efektif dikarenakan melalui khotbah Jumat, Habibi dan khatib lainnya dapat memberikan edukasi tentang dampak merugikan dari perkawinan anak kepada para laki-laki. Mengingat laki-laki masih memegang peran penting dalam norma masyarakat, mereka memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan di keluarga dan masyarakat.

Habibi juga menemui para khatib yang terbiasa mengisi khotbah Jumat lalu mengusulkan adanya tema pencegahan perkawinan anak dalam ceramah mereka. Melalui khotbah Jumat, Habibi berharap laki-laki yang sudah teredukasi dapat mengurangi dukungan terhadap perkawinan anak terutama setelah Ramadan dan musim panen padi. Pada dua waktu tersebut, kasus perkawinan anak terjadi lebih banyak dibandingkan waktu lainnya.

This strategy proved highly effective. Through Friday sermons, Habibi and other *khatibs* were able to educate men about the harmful effects of child marriage. In many communities, men hold significant influence over family and community decisions, making them a crucial audience for these messages.

Habibi also met with Friday sermon *khatibs* to encourage them to include child marriage prevention as a topic in their sermons, especially during times when child marriage tends to spike, such as after Ramadan and during the rice harvest season. His goal was to reduce support for these harmful practices by raising awareness among men.

Meluaskan Edukasi & Program Keagamaan

Habibi menggambarkan bagaimana khotbah Jumat yang disampaikan oleh para khatib juga membahas berbagai isu tentang perlindungan anak. Mulai dari pola asuh anak yang sesuai syariat Islam, hak anak atas pendidikan, hingga aturan terkait perkawinan anak. Tak hanya itu saja, para khatib juga mengedukasi jamaah salat Jumat terkait peraturan desa yang mengatur tentang pendewasaan usia perkawinan dan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku perkawinan anak.

Sebelum khotbah, LPAD biasanya memberikan materi singkat tentang isu perlindungan anak yang dapat disisipkan ke dalam ceramah. Karena para khatib ini juga merupakan bagian dari divisi hubungan masyarakat LPAD, mereka sudah memahami berbagai isu terkait anak dan mampu menyampaikannya dengan baik.

Lombok, yang dikenal dengan norma agama Islam yang kuat, memungkinkan pendekatan berbasis agama melalui khotbah Jumat sebagai landasan moral dan spiritual dalam upaya penghapusan perkawinan anak. Nilai-nilai agama seperti perlindungan anak dan keadilan relevan dan dapat diterima oleh para peserta khotbah Jumat, terutama laki-laki karena mereka memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan di keluarga dan masyarakat.

Upaya dan strategi ini sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Pada tahun 2021 Habibi berhasil mencegah kasus perkawinan anak, meskipun di tahun itu tercatat 12 laporan dan temuan kasus perkawinan anak. Namun, selama periode antara bulan September hingga awal tahun 2021, ada sejumlah kasus perkawinan anak yang tidak tercatat dengan baik, sehingga jumlah sebenarnya mungkin lebih dari 12 kasus. Di tahun 2022, jumlah kasus perkawinan anak masih cukup tinggi, tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan, di mana tidak ada laporan kasus baru. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah laporan kasus perkawinan anak berkurang menjadi 10. Ini setidaknya menunjukkan bahwa strategi pencegahan yang dilakukan mulai memberikan dampak positif.

Inisiatif Habibi tidak berhenti di sana. Ia terus melanjutkan edukasi pencegahan perkawinan anak ke dusun-dusun lain. Ia memperluas cakupan sosialisasi melalui program-program keagamaan

Expanding Education & Religious Programs

Habibi explains that the Friday sermons delivered by *khatibs* also address various child protection topics, including parenting practices that align with Islamic teachings, children's rights to education, and regulations on child marriage. Additionally, the *khatibs* educate the congregation about village regulations that set the legal age of marriage, as well as the criminal penalties for those involved in facilitating child marriages.

To support the *khatibs*, LPAD provides them with materials on child protection issues, which they can integrate into their sermons. Since many of these religious leaders are also part of LPAD's public relations division, they are well-informed about child protection issues and can effectively communicate these topics to the congregation.

Lombok, with its strong Islamic values, offers an ideal foundation for religious-based approaches like these Friday sermons, which serve as moral and spiritual guidance in the fight against child marriage. Religious principles, such as child protection and the pursuit of justice, resonate deeply with Friday prayer attendees, particularly men, who often have significant influence over family and community decisions.

These efforts have already shown positive results. In 2021, Habibi successfully prevented several cases of child marriage, although 12 cases were still recorded that year. Some cases between September and early 2021 went unreported, meaning the actual number could have been higher. In 2022, the number of child marriage cases remained high. However, by 2023, a significant reduction in child marriage was observed, with no new cases reported. By mid-2024, the number of reported cases had dropped to just 10, indicating that prevention efforts were making a positive impact.

Habibi's initiative didn't stop there. He expanded child marriage prevention education to other villages, incorporating it into religious events such as Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) and outreach to Islamic boarding schools. Habibi explained that during the MTQ competitions, free time was used to deliver talks on child marriage prevention, further extending the reach of these vital messages.

lainnya, seperti Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) dan kegiatan yang menysasar pondok pesantren. Habibi menjelaskan, pada saat santri-santri mengikuti lomba MTQ, waktu luang akan diisi dengan ceramah-ceramah tentang pencegahan perkawinan anak.

Buku Saku dan Penelitian

Ke depannya, Habibi ingin mewujudkan dua inisiatif penting. Pertama, ia berencana untuk membuat buku saku yang memuat kutipan undang-undang, peraturan daerah (Perda), atau peraturan desa (Perdes), terkait pencegahan perkawinan anak. Buku saku ini akan berfungsi sebagai pedoman dan panduan praktis bagi petugas lapangan, memberikan mereka landasan hukum yang jelas saat melakukan edukasi atau saat menghadapi kasus-kasus di lapangan. Dengan adanya buku saku ini, para petugas pelaksana dapat dengan mudah merujuk pada dasar hukum yang memperkuat posisi mereka dalam mencegah perkawinan anak dan mendukung aktivitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Kedua, Habibi berencana melakukan penelitian dan pencatatan terhadap perkawinan anak yang sudah terjadi. Penelitian ini akan melibatkan para penyintas perkawinan anak untuk mengidentifikasi berbagai faktor penyebab, kegagalan perkawinan, dan masalah-masalah lainnya yang muncul selama perkawinan anak berlangsung. Hasil penelitian ini nantinya akan digunakan sebagai referensi untuk menyusun materi perlindungan anak yang lebih relevan dan sesuai dengan kondisi di tiap-tiap desa.

Dengan kedua inisiatif ini, Habibi berharap dapat membekali petugas pelaksana dengan alat dan pengetahuan—termasuk regulasi— yang lebih baik untuk mencegah perkawinan anak, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak-dampak negatif perkawinan anak dalam masyarakat.

Pocket Book and Research

Looking ahead, Habibi envisions two key initiatives. First, he plans to develop a pocketbook containing excerpts from national laws, regional regulations (Perda), and village regulations (Perdes) on child marriage prevention. This pocketbook will serve as a practical guide for field officers, providing clear legal references during educational sessions or when addressing cases in the community. With this guide in hand, practitioners will be able to refer to legal frameworks that strengthen their efforts to prevent child marriage and support Community-Based Child Protection (PATBM) activities.

Second, Habibi aims to conduct research and documentation on child marriages that have already occurred. This research will involve survivors of child marriage to uncover contributing factors, the failures of these marriages, and the broader consequences of child marriage. The insights from this research will be used as a reference to develop more relevant child protection materials, tailored to the specific conditions of each village.

Through these two initiatives, Habibi hopes to better equip field officers with the tools and knowledge they need—including legal frameworks—to prevent child marriage, while also providing the community with a deeper understanding of the negative impacts of child marriage.





Habibi dan rekannya di LPAD Kuripan Utara, Kabupaten Lombok Barat, berdiskusi mengenai pencegahan perkawinan anak melalui ceramah Jumat dan safari Ramadan.

(Kredit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)

Habibi and his colleagues at the Village Child Protection Agency (LPAD) in Kuripan Utara, West Lombok District discuss the prevention of child marriage through Friday sermons and Ramadan safari activities.

(Credit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)



Nurharyani, Ketua Tim Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Lombok Barat.
(Kredit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)
Nurharyani, the head of the Child-Friendly School (SRA) team in West Lombok District.
(Credit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)

PILAR PERUBAHAN

DI SEKOLAH RAMAH ANAK

A PILLAR OF CHANGE IN THE CHILD-FRIENDLY SCHOOL

Nurharyani, sehari-hari sering disapa Ibu Nur, adalah ketua tim Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMAN 1 Lembar, Lombok Barat. Ia merupakan bagian dari perubahan signifikan sejak kehadiran Program GEMA CITA di sekolahnya pada tahun 2022. Ibu Nur menjadi salah satu sosok penggerak yang memiliki komitmen untuk mewujudkan sekolahnya menjadi sekolah ramah anak.

Nurharyani, known as Ibu Nur, is the head of the Child-Friendly School (CFS) team at SMAN 1 Lembar, West Lombok. Since the GEMA CITA (End Child Marriage) Program was introduced at her school in 2022, she has been a driving force behind significant changes, committed to transforming the school into a truly child-friendly environment.



Seorang guru melayani peserta didik yang membutuhkan pembalut dan obat-obatan.
(Kredit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)
A teacher assists a student in need of sanitary pads and medication.
(Credit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)



Nurharyani menyampaikan informasi mengenai Sekolah Ramah Anak (SRA) kepada sejumlah peserta didik di Kabupaten Lombok Barat. (Kredit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)
 Nurharyani provides information about the Child-Friendly School (SRA) to a group of students in West Lombok District (Credit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)

Ibu Nur merasa Program GEMA CITA sangat efektif karena berfokus langsung pada peserta didik melalui pendidik sebaya yang menjadi agen perubahan di lingkungan mereka; berbeda dengan program lain yang umumnya lebih menasar pelatihan pada guru. Menurut Ibu Nur, pendekatan program yang menasar peserta didik dan guru tersebut, memungkinkan guru dan peserta didik sama-sama tumbuh dalam pemahaman mereka tentang isu sensitif, termasuk perkawinan anak dan kehamilan remaja.

Kemampuan untuk menyampaikan pendapat dan lebih terbuka menjadi salah satu perubahan yang Ibu Nur amati pada peserta didiknya sejak mereka mengikuti serial diskusi GEMACITA. “Mereka menjadi lebih berani menyuarakan pendapatnya. Tidak diam saja dan memikirkannya sendiri hingga stres,” ujar Ibu Nur. Ia pun lantas mendorong sesama rekan guru untuk juga ikut terbuka dan menindaklanjuti kritik dari peserta didik sebagai masukan berharga.

Edukasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Ibu Nur juga memfasilitasi diskusi dengan para guru tentang topik yang terkadang dianggap tabu oleh sesama rekan guru lain. Sesekali ia menghadirkan pendidik sebaya, *master trainer*, dan guru-guru untuk mendiskusikan materi-materi

What stood out to Ibu Nur about the GEMA CITA Program was its direct focus on students through peer educators, who became agents of change within their community. This approach differed from other programs, which typically centered on teacher training. According to Ibu Nur, the program’s dual focus on both students and teachers allowed everyone to grow in their understanding of sensitive issues, including child marriage and teenage pregnancy.

One of the most noticeable changes Ibu Nur observed in her students after they participated in GEMA CITA’s discussion series was their newfound confidence in expressing their opinions. “They are more willing to speak up. They don’t keep everything inside, stressing over it alone,” she explained. She encouraged her fellow teachers to be equally open, viewing student feedback as valuable insights for improving the school environment.

Education on Sexual and Reproductive Health and Rights

Ibu Nur also facilitated discussions with teachers on topics that were often considered taboo. Occasionally, she invited peer educators, master trainers, and teachers to discuss sensitive issues surrounding Sexual and Reproductive Health

sensitif atau dianggap tabu dari Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR). Di dalam materi HKSR terdapat pengenalan terhadap organ-organ reproduksi. Menurutnya, tujuan dari materi tersebut bukan tentang memperlihatkan bagian tubuh yang pribadi, tetapi tentang memahami reproduksi dan pemahaman terkait pubertas sebagai bagian penting dari edukasi peserta didik.


Dengan memahami pengetahuan HKSR, Ibu Nur melihat ini sebagai peluang untuk mencegah perkawinan anak. Di sekolah tempat ia mengajar, upaya mencegah perkawinan anak menuntut perhatian khusus. Dalam satu lokakarya, ia bahkan pernah mengusulkan adanya penerapan denda pada pelaku perkawinan anak, baik terhadap anak dan orang tua mereka, walaupun usulan tersebut tentu saja ditolak karena terlalu berisiko.

Adanya diskusi-diskusi secara terbuka, Ibu Nur mengaku senang karena peserta didik mulai memahami dan menyadari mereka yang melakukan perkawinan anak sering kali adalah korban. “Kebanyakan dari teman-temannya yang menikah di usia sekolah itu, pernikahannya tidak bertahan lama. Hanya bertahan setelah dia melahirkan, memiliki anak, kemudian sang anak akan dirawat sendiri,” ujar Ibu Nur. Dari apa yang disampaikannya, peserta didik mulai menyadari tentang tanggung jawab besar dan dampaknya jika mereka melakukan perkawinan anak.

and Rights (SRHR), including education on reproductive organs. For Ibu Nur, the goal was not to focus on sensitive areas, but to understand reproduction and puberty as essential aspects of students’ education.

Ibu Nur saw SRHR education as a crucial tool in preventing child marriage, a significant issue in her school community. During one workshop, she even proposed imposing fines on those involved in child marriages, including both the children and their parents. Although the proposal was considered too risky and ultimately rejected, Ibu Nur’s commitment to child marriage prevention remained firm.

Through open dialogue, Ibu Nur was pleased to see that students started to understand that those involved in child marriages were often victims. “Most of the marriages between school-age friends don’t last. They only stay together until the child is born, and then the mother ends up raising the child on her own,” Ibu Nur explained. Her students began to realize the heavy responsibilities and consequences of child marriage.



Nurharyani berdiskusi dengan tim SRA yang berupaya menciptakan lingkungan sekolah aman dan nyaman. (Kredit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)
Nurharyani discusses with the SRA team regarding their efforts to create a safe and comfortable school environment (Credit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)

Keamanan & Kenyamanan di Sekolah

Dalam komitmennya yang teguh untuk mewujudkan SRA, Ibu Nur sangat mengutamakan kenyamanan dan keamanan peserta didik selama kegiatan belajar-mengajar. Salah satu inisiatif penting yang diterapkannya di sekolah adalah pengadaan pembalut dan celana dalam pengganti untuk peserta didik perempuan yang menstruasi saat di sekolah. Dukungan ini didanai melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sumbangan seragam dari para alumni.

Ibu Nur juga sangat berkomitmen untuk mencegah perkawinan anak dan memastikan agar peserta didik tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka, terlepas dari kondisi yang mereka hadapi. Upayanya ini mencakup peserta didik yang berisiko melakukan perkawinan anak maupun mereka yang telah mengalaminya.

Pada akhir tahun 2022, Ibu Nur bersama tim SRA dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) berhasil mencegah perkawinan anak dari salah satu peserta didik yang duduk di kelas 11. Setelah memberikan pendampingan psikologis kepada anak tersebut, Ibu Nur dan tim SRA melakukan mediasi dengan keluarga dan berhasil mendorong anak tersebut untuk melanjutkan sekolah. Akhirnya anak tersebut kembali bersemangat untuk meneruskan sekolahnya, dan akhirnya ia berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga lulus SMA.

Pada kasus lainnya, seorang peserta didik kelas 12 tidak berhasil dicegah perkawinannya dan kemudian mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Ibu Nur dan tim SRA kembali melakukan penjangkauan ke rumah anak tersebut, melakukan mediasi dengan keluarga, dan mencari solusi agar anak tersebut dapat mengikuti ujian sekolah di rumah dengan pengawasan dari guru.

Kasus terbaru terjadi pada pertengahan tahun 2024, melibatkan seorang peserta didik laki-laki kelas 11 yang tidak dapat menghindari perkawinan anak karena tekanan keluarga—meskipun anak tersebut masih ingin melanjutkan sekolah. Anak laki-laki tersebut menikahi seorang peserta didik perempuan dari sekolah lain. Memahami keinginan anak laki-laki tersebut untuk tetap bersekolah, Ibu Nur dan tim SRA segera melakukan mediasi

Ensuring Safety & Comfort in School

Dedicated to creating a safe and supportive environment, Ibu Nur prioritized students' safety and comfort during the school day. One of her key initiatives was providing sanitary pads and spare underwear for female students who experienced menstruation at school. This initiative was funded by the School Operational Assistance (BOS) and alumni contributions.

Ibu Nur was also deeply committed to preventing child marriages and ensuring that students at risk of child marriage could continue their education, regardless of the challenges they faced. Her efforts extended to students already affected by child marriage, ensuring they didn't drop out of school.

At the end of 2022, Ibu Nur and the CFS team, together with the Women and Children Protection Unit (UPT PPA), successfully intervened in a case involving an 11th-grade student.

After providing psychological counseling to the student, Ibu Nur and the CFS team mediated with the family and encouraged the student to continue her education. The student regained her enthusiasm for school and ultimately graduated from high school.

In another instance, a 12th-grade student who could not be prevented from marrying and later experienced an unintended pregnancy (KTD) was supported by Ibu Nur and the CFS team. They reached out to the student's home, mediated with the family, and arranged for the student to take her school exams at home, under the supervision of a teacher.

The most recent case occurred in mid-2024, a male 11th-grade student was forced into marriage by his family, despite his desire to stay in school. He married a female student from another school. Understanding his desire to stay in school, Ibu Nur and the CFS team mediated with both families. Although the marriage could not be prevented, Ibu Nur and the CFS team ensured that both students continued their education through an open high school program in Gerung, West Lombok.

Beyond her efforts to prevent child marriage at her school, Ibu Nur was also deeply involved in child marriage prevention in her village, where cases

dengan keluarga kedua belah pihak. Mereka berupaya agar, meskipun perkawinan anak tidak dapat dicegah, anak-anak tersebut tidak putus sekolah. Berkat advokasi dan pendekatan yang dilakukan oleh Ibu Nur dan tim SRA, anak tersebut dan pasangannya akhirnya melanjutkan pendidikan mereka melalui program SMA terbuka di Gerung, Lombok Barat.

Selain fokus mencegah perkawinan anak di sekolah tempatnya mengajar, Ibu Nur juga aktif melakukan upaya pencegahan perkawinan anak di lingkungan desanya, yang juga pernah terjadi perkawinan anak. Walaupun sempat mendapatkan tendensi negatif dari masyarakat sekitar karena upayanya mencegah perkawinan anak, Ibu Nur tidak pernah patah semangat. Ia tetap teguh mengupayakan pemenuhan hak anak melalui pencegahan perkawinan anak di sekitarnya, baik di sekolah maupun di lingkungan desanya.

Menginspirasi Peserta Didik Melalui Alumni

Sebagai bagian dari upayanya untuk mencegah perkawinan anak maupun mencegah peserta didik putus sekolah, Ibu Nur juga sering mengundang alumni-alumni SMAN 1 Lembar yang telah sukses, bahkan ada yang menempuh pendidikan hingga jenjang S2 atau menerima beasiswa ke luar negeri. Para alumni ini hadir untuk memberikan inspirasi kepada peserta didik, membuktikan bahwa meskipun mereka berasal dari latar belakang yang penuh tantangan—seperti orang tua yang bekerja sebagai buruh migran, perceraian, atau pola asuh kakek-nenek—mereka tetap bisa mengatasi kesulitan dan meraih impian. Dengan langkah ini, Ibu Nur berharap peserta didik di sekolahnya termotivasi untuk tetap melanjutkan pendidikan, apa pun situasi sosial yang mereka hadapi.

Peran Ibu Nur tidak hanya sebagai pendidik; ia juga memastikan bahwa sekolahnya menjadi tempat yang aman dan mendukung setiap peserta didik. Ia membekali mereka dengan pengetahuan dan sumber daya untuk membangun masa depan yang lebih baik.

had previously occurred. Despite facing negative reactions from some community members, Ibu Nur remained undeterred. She continued her work to uphold children's rights, both at school and in her village.

Inspiring Students through Alumni

As part of her commitment to keeping students in school and preventing child marriage, Ibu Nur often invited successful alumni of SMAN 1 Lembar to share stories. Many of these alumni—some of whom had pursued master's degrees or received scholarships to study abroad—came from challenging background. Such as migrant worker parents, divorced families, or being raised by grandparent guardianship. By sharing their experiences, these alumni showed current student that it is possible to overcome adversity and achieve their dreams. Through these stories, Ibu Nur hoped to inspire her students to continue their education, no matter their circumstances.

Ibu Nur's role extends far beyond teaching. She has made SMAN 1 Lembar a safe, supportive place for every student where they are equipped with the knowledge and resources they need to build better futures.



Nurharyani menerima laporan tentang salah satu siswa yang menjadi penyintas kekerasan seksual (KS). (Kredit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)
Nurharyani receives a report about a student who is a survivor of sexual violence in West Lombok District. (Credit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)



Ade, salah satu pendidik sebaya dalam program GEMA CITA oleh Plan Indonesia di Kabupaten Sukabumi. (Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)
Ade, a peer educator in the GEMA CITA Program by Plan Indonesia in Sukabumi District.
(Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)

MELALUI GORESAN MURAL, BERAKSI DALAM MORAL

CREATING CHANGE THROUGH MURALS AND ADVOCACY

Ade (19) tumbuh dengan membawa beban masa lalu yang memengaruhi pandangannya terhadap praktik perkawinan anak. Kedua orang tuanya menikah di usia yang sangat muda, dan Ade lahir ketika ibunya baru berusia 17 tahun. Ketidaksiapan fisik dan mental sang ibu membuat Ade lahir prematur, sementara ketidaksiapan emosi dan ekonomi memicu perpisahan orang tuanya. Ibunya menjadi buruh migran, meninggalkan Ade yang diasuh oleh neneknya. Masa kecil yang penuh tantangan dan pengalaman hidupnya, membuat Ade tumbuh besar dengan pola asuh yang tidak seimbang. Di satu sisi, apa yang dilaluinya di masa lalu telah menumbuhkan kesadaran dalam dirinya bahwa menolak perkawinan anak berarti melindungi masa depan anak dan kaum muda lainnya, seperti dirinya.

Ade (19) grew up carrying the weight of his past, which shaped his views on the practice of child marriage. His parents married at a young age, and Ade was born when his mother was only 17. Due to her physical and emotional unpreparedness, Ade was born prematurely. The emotional and financial instability that followed led to his parents' separation. His mother became a migrant worker, leaving Ade to be raised by his grandmother. These challenging childhood and life experiences shaped Ade's belief that rejecting child marriage is crucial to protecting the future of children and youth, just like himself.



Ade membuat mural bertema pencegahan perkawinan anak di sekolahnya, di Kabupaten Sukabumi.
(Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)
Ade creates a mural with the theme of child marriage prevention at his school in Sukabumi District.
(Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)

Pengalaman hidup dan masa kecil yang penuh tantangan membentuk pandangan dan kreativitas Ade. Sebelum bergabung sebagai pendidik sebaya dalam Program GEMA CITA, Ade kerap kesulitan mengekspresikan diri dan berinteraksi secara sosial. Namun, melalui mural, ia menemukan cara yang tepat menyuarakan pesan-pesan moral dan sosial, sekaligus mengekspresikan dirinya.

Bagi Ade, mural adalah medium yang kuat untuk menyampaikan pesan moral. Ia percaya bahwa kampanye melalui mural sangat cocok untuk remaja karena komunikasi yang dilakukan bersifat nonverbal dan tersampaikan secara kreatif. “Selain

Ade’s difficult upbringing also shaped his creativity and worldview. Before becoming a peer educator in the GEMA CITA (End Child Marriage) Program, Ade often struggled to express himself and engage socially. But through murals, he found a powerful way to voice moral and social messages while expressing his identity.

For Ade, murals are a compelling medium to convey moral messages. He believes that murals resonate with young people because they communicate non-verbally and creatively. “Aside from their large size, which ensures they’re seen by many, murals are the most enduring medium



Sejumlah remaja dan kaum muda melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak dan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di Kabupaten Sukabumi. (Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)
A group of teenagers and youth campaign for child marriage prevention and Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) in Sukabumi District. (Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)

gambarnya besar dan pasti terlihat oleh banyak orang, mural tuh media yang paling awet karena sulit dihapus,” kata Ade. Melalui mural berukuran besar di tembok sekolah dan mencolok, pesan yang ia sampaikan menjadi lebih menggugah dan efektif daripada sekadar poster yang berisiko mudah terkelupas. “Lewat mural, setiap orang yang masuk ke area sekolah juga jadi tahu bahwa sekolah itu menolak perkawinan anak,” tambahnya. Karya mural yang dilukis Ade di tembok sekolah menjadi saksi bisu dari perjuangan Ade dan teman-temannya dalam menciptakan perubahan moral di lingkungan sekolahnya. Ini juga sejalan dengan advokasi yang ia lakukan, yaitu mencegah perkawinan anak.

because they're hard to erase,” Ade explains. The large murals he painted on school walls stand as silent witnesses to the fight against child marriage. “Through murals, everyone who enters the school can see that the school stands against child marriage,” he adds. These murals became a testament to Ade and his peers’ efforts to drive moral change in their school, aligned with his advocacy to prevent child marriage.



Advokasi Tata Tertib dan Kebijakan Sekolah

Dengan rambut ikalnya yang khas, Ade selalu haus akan pengetahuan, dan keterlibatannya dalam Program GEMA CITA pada tahun 2022, menjadi titik balik penting dalam hidupnya. Sebagai pendidik sebaya, salah satu tugas Ade adalah memfasilitasi serial diskusi terkait GEMA CITA. Melalui serial diskusi yang ia fasilitasi, Ade mulai memahami banyak hal yang sebelumnya luput dari perhatiannya, terutama tentang hak-hak anak. Dengan pemahaman yang baru, ia menggali lebih dalam tentang hak-hak anak yang dimulainya dari lingkungan terdekat, yakni sekolahnya.

Ade pun mulai mengadvokasi hak-hak anak di sekolahnya dan mendorong perubahan kebijakan sekolah yang dianggap diskriminatif. Keberaniannya untuk menyampaikannya pada guru-guru, termasuk guru Bimbingan Konseling (guru BK), mengawali perubahan besar di sekolahnya. Ade lantas membawa permasalahan ini kepada kepala sekolah, dan hasilnya, beberapa tata tertib dan kebijakan sekolah yang diskriminatif pun diubah. Misalnya, aturan masuk sekolah pukul 07.15 yang tadinya hanya berlaku untuk peserta didik, kini juga berlaku untuk guru-guru. Aturan-aturan tidak tertulis yang semula tetapi dilaksanakan oleh sekolah, kini tak lagi ada. Contohnya, aturan cukur rambut bagi peserta didik laki-laki. Dahulu, siapa pun guru bisa mencukur rambut panjang peserta didik laki-laki. Namun, berkat advokasi Ade, sekarang sekolah telah menghadirkan tukang cukur yang dibayar oleh sekolah. Dengan cara-cara seperti ini, aturan sekolah diterapkan dengan lebih adil dan bermartabat bagi peserta didik.

Diskusi demi diskusi yang diinisiasi oleh Ade, baik dengan teman sebaya, sesama pendidik sebaya, maupun guru-guru hingga kepala sekolah, membuahkan hasil, yaitu lingkungan sekolah yang lebih adil dan nyaman. Sekolah juga mulai menerapkan pembinaan terhadap peserta didik jika mereka melakukan pelanggaran tata tertib dan kebijakan sekolah. Tidak ada lagi hukuman secara fisik atau hukuman yang mengarah pada perilaku kekerasan terhadap peserta didik, melainkan dengan pembinaan yang lebih positif. Ade percaya, perubahan ini adalah langkah penting untuk menciptakan sekolah yang benar-benar aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik.

Advocating for School Policies and Regulations

With his signature curly hair and thirst for knowledge, Ade's involvement in the GEMA CITA Program in 2022 became a turning point in his life. As a peer educator, one of Ade's responsibilities was to facilitate discussion sessions on GEMA CITA. Through these sessions, Ade began to understand issues that had previously escaped his attention, particularly children's rights. Armed with this new awareness, he started advocating for the rights of children, starting in his own school.

Ade began pushing for changes in school policies that he found discriminatory. His courage to raise these issues with teachers, including counseling teachers (BK teachers), led to real change. After taking the matter to the school principal, several school policies were revised. For example, the rule requiring students to arrive by 7:15 am, which had previously applied only to students, was extended to teachers as well. Other unwritten rules that were enforced informally, such as random haircuts for male students, were also changed. Thanks to Ade's advocacy, the school now hires barbers to provide proper haircuts, funded by the school. These changes have made school rules fairer and more respectful of students' dignity.

Through continuous dialogue with peers, fellow peer educators, teachers, and even the principal, Ade helped foster a more just and comfortable school environment. The school also introduced a more positive approach to handling students who violated school rules, replacing physical punishment or any form of violence with a more supportive form of guidance. Ade believes this change is a crucial step toward creating a safe and comfortable environment for all students.

Advocating Against Child Marriage

Ade's advocacy extended beyond school policies. Together with other peer educators, he also advocated to ensure that the school no longer allowed students to drop out just to get married. Ade was aware of past cases where the school had granted such requests, but he was determined to prevent it from happening again.

Advokasi Cegah Perkawinan Anak

Perjuangan Ade tidak berhenti di sana. Bersama pendidik sebaya lainnya, ia juga mengadvokasi agar pihak sekolah tidak mengizinkan peserta didiknya keluar dari sekolah atau tidak melanjutkan pendidikannya hanya karena alasan perkawinan anak. Ade tahu bahwa kasus-kasus seperti ini pernah terjadi di masa lalu, di mana pihak sekolah mengizinkan permintaan tersebut. Berkaca pada sejumlah kasus yang pernah terjadi, menurut Ade, hal ini tidak boleh terulang lagi.

Di usianya yang masih terbilang muda, Ade tak gentar untuk terus-menerus melakukan diskusi bersama para guru dan kepala sekolah. Kini, sekolah tidak lagi meluluskan permohonan peserta didik untuk menikah sebelum menyelesaikan pendidikan mereka. Ade dan pendidik sebaya lainnya pun membujuk kaum muda lainnya untuk tetap melanjutkan sekolah terlebih dahulu dan katakan tidak pada kawin anak.

Meski demikian, Ade menyadari bahwa perubahan besar membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata dan kampanye visual. Menurutnya, pemahaman mengenai HKSR (Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi) seharusnya menjadi prioritas utama bagi pemangku kebijakan, khususnya adanya pendampingan dalam program.

“HKSR tuh hampir ada di setiap desa, di pemerintahan. Kebijakannya ada, programnya ada, tapi pendampingannya yang *nggak* ada,” ungkap Ade.

Dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan memastikan pendampingan yang memadai, Ade yakin bahwa anak dan kaum muda tidak lagi sekadar bagian dari angka statistik. Melibatkan anak dan kaum muda dalam pengambilan keputusan untuk dirinya dan membekali mereka dengan pengetahuan dan pemahaman yang tepat adalah kunci menentukan masa depan mereka.

Despite his young age, Ade was unafraid to engage in ongoing discussions with teachers and the school principal. Today, the school no longer grants students permission for students to marry before completing their education. Ade and his fellow peer educators actively persuade young people to stay in school and say no to child marriage.

However, Ade knows that creating lasting change requires more than words and visual campaigns. He emphasizes the importance of Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) education, which should be prioritized by policymakers and supported with proper program.

“SRHR is discussed in almost every village, and government policies and programs exist, but what’s lacking is the support and follow-through,” Ade says.

By involving the government, the community, and ensuring adequate program support, Ade believes that children and young people will no longer be mere statistics. Empowering them to take part in decision-making and equipping them with the right knowledge and understanding is key to shaping their future.



Ade memegang cat air yang digunakannya untuk membuat mural bertema pencegahan perkawinan anak di sekolahnya, di Kabupaten Sukabumi. (Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)
Ade holds watercolor paint, which he uses to create a mural with the theme of child marriage prevention at his school in Sukabumi District. (Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)



Mamat, kepala sekolah di SMAN 1 Warungkiara, Kabupaten Sukabumi.
(Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)
Mamat, the principal of SMAN 1 Warungkiara, Sukabumi District.
(Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)

DARI RUANG KELAS, MEMBAWA DAMPAK LUAS

FROM THE CLASSROOM TO A WIDER IMPACT

Di satu siang, saat peserta didik SMAN 1 Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi sedang mengikuti pelajaran di kelas, Pak Mamat, sang kepala sekolah, duduk di ruangannya dengan wajah tampak merenung. Ia tampak gusar. Pikirannya tidak lepas dari tantangan besar yang ia hadapi: angka putus sekolah di sekolahnya terus meningkat setiap tahun. Jumlah peserta didik yang berhasil menyelesaikan pendidikan di sekolahnya terus menurun setiap tahun. Bagi Pak Mamat, setiap peserta didik yang tidak berhasil lulus bukan sekadar statistik, tetapi impian dan masa depan peserta didiknya yang kandas di tengah jalan.

One afternoon, while students at SMAN 1 Warung Kiara in Sukabumi District were attending classes, Principal Pak Mamat sat in his spacious office, deep in thought. His expression was troubled, weighed down by the growing concern over a persistent issue—the rising school dropout rates. To Pak Mamat, every student who didn't graduate wasn't just a number, but a future cut short and a dream unfulfilled.



Sejumlah piala dan foto guru serta peserta didik dipajang di ruang kerja kepala sekolah SMAN 1 Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. (Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)
Several trophies and photos of teachers and students are displayed in the principal's office at SMAN 1 Warungkiara, Sukabumi District. (Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)



Penyediaan fasilitas sanitasi yang layak menjadi salah satu pendukung program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMAN 1 Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. (Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)

Tiga tahun yang lalu, pada tahun 2020—tepatnya saat pandemi COVID-19—sekolahnya menerima 432 peserta didik baru. Dari 432 peserta didik baru, hanya 410 yang berhasil menyelesaikan pendidikan mereka.

“Berarti kurang lebih 22 orang itu berguguran di perjalanan”, ungkap Pak Mamat dengan nada prihatin.

Faktor ekonomi dan praktik perkawinan anak menjadi penyebab utama putus sekolah. Pascapandemi, setelah situasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) kembali normal, meskipun sekolah gratis tetapi banyak orang tua yang tidak sanggup membiayai transportasi dan kebutuhan sekolah anaknya. Namun, masalah terbesar yang Pak Mamat hadapi adalah perkawinan anak. Ini adalah tantangan yang memaksa banyak peserta didik putus sekolah.

Three years ago, in 2020, during the COVID-19 pandemic, the school welcomed 432 new students. By the time graduation came, only 410 students completed their education.

“That means about 22 students dropped out along the way,” Pak Mamat said with a tone of concern.

Economic challenges and child marriage were the main causes of this troubling trend. Despite free education, many parents couldn’t afford transportation and other school-related expenses. However, child marriage was the most significant issue, forcing many students to leave school.



The provision of adequate sanitation facilities is one of the supporting factors for the Child-Friendly School (SRA) Program at SMAN 1 Warungkiara, Sukabumi District. (Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)

Mandiri Mengadopsi GEMA CITA

Pada tahun 2022, hadirnya Program Generasi Emas Bangsa Bebas Perkawinan Usia Anak (GEMA CITA) yang diinisiasi oleh Plan Indonesia membawa angin segar. Program GEMA CITA bertujuan meningkatkan pemahaman tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM), anti perundungan, dan pencegahan perkawinan anak.

Pak Mamat menyambut program ini dengan tangan terbuka. Program GEMA CITA tak hanya selaras dengan Kurikulum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI), tapi juga sejalan dengan visi dan misi Pak Mamat untuk membentuk peserta didik yang berkarakter, peduli, dan saling menolong.

Independently Adopting GEMA CITA

In 2022, the GEMA CITA (End Child Marriage) Program, initiated by Plan Indonesia, brought a much-needed change. The program aimed to raise awareness about Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR), Menstrual Hygiene Management (MHM), anti-bullying, and child marriage prevention.

Pak Mamat welcomed the program with open arms. GEMA CITA aligned not only with the school curriculum of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia but also with his vision of nurturing students with strong character who support one another.

“Jadi, tidak ada alasan bagi kami untuk menolak. Kami malah sangat menyambut,” kata Pak Mamat dengan antusias.

Awalnya, materi-materi Program GEMA CITA hanya diberikan kepada peserta didik kelas 10 dan 11. Namun, Pak Mamat dengan visi kuatnya memutuskan untuk memperluas cakupan program. Dengan inisiatifnya sendiri, Pak Mamat memutuskan bahwa seluruh peserta didik baru di tahun ajaran berikutnya juga harus mendapatkan materi penting ini. Inisiatif Pak Mamat sendiri tentu beralasan. Ia tidak ingin program dan praktik-praktik baik dalam GEMA CITA hanya menjadi bagian terbatas dari kurikulum, tetapi sebagai gerakan yang meresap di seluruh lapisan sekolah yang ia pimpin.

Melalui 18 sesi diskusi, materi-materi dalam Program GEMA CITA sangat membantu dalam pembentukan karakter peserta didik. Salah satu elemen penting dari GEMA CITA adalah pelatihan kepada peserta didik untuk menjadi pendidik sebaya yang kemudian mengedukasikan materi kepada teman-teman mereka di sekolah. Pak Mamat melihat peran ini sebagai sesuatu yang sangat penting untuk keberhasilan program. Inisiatif Pak Mamat pun tak hanya berhenti di situ. Dengan dukungan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pak Mamat melatih 31 pendidik sebaya baru pada Oktober 2023, memastikan bahwa generasi pendidik sebaya terus berlanjut dan memberikan materi-materi ini kepada teman-teman mereka.

“Kami merasa program ini sangat baik dan perlu kami lanjutkan, sehingga tentunya kami punya kewajiban untuk melatih para *peer educator* yang baru ini untuk nantinya menjadi narasumber di kelas untuk peserta didik kelas satu yang baru,” tegas Pak Mamat dengan optimis.

Salah satu kunci keberhasilan dari strategi Pak Mamat adalah pelatihan pendidik sebaya yang tidak hanya menyebarkan materi GEMA CITA, tetapi juga berfungsi sebagai figur yang dapat berkomunikasi langsung dengan sesama peserta didik. Dengan demikian, mereka merasa lebih nyaman untuk membahas masalah yang mereka hadapi, termasuk topik-topik sensitif seperti perkawinan anak dan hak kesehatan reproduksi.

“So, there was no reason for us to reject it. In fact, we were very eager to adopt it,” Pak Mamat said enthusiastically.

Initially, GEMA CITA materials were only provided to students in grades 10 and 11. However, with his strong vision, Pak Mamat decided to expand the program’s reach, ensuring that all new students in the following academic year would also receive this crucial education. He was determined not to limit the positive impact of GEMA CITA to just a portion of the curriculum, but to embed it in every aspect of the school’s culture.

Through 18 discussion sessions, GEMA CITA played a pivotal role in shaping students’ character. A key element of the program was training students to become peer educators who would then pass on the materials to their classmates. Recognizing the importance of this role, Pak Mamat took further initiative. Using funds from the school’s operational budget (BOS), he trained 31 new peer educators in October 2023, ensuring that the legacy of peer education continued and that future students would benefit from this knowledge.

“We believe this program is very valuable and needs to be continued, so it’s our responsibility to train new peer educators to present these important topics to first-year students,” Pak Mamat confidently stated.

One of the key reasons for the success of his initiative was that peer educators not only shared GEMA CITA’s materials but also served as approachable figures for their peers. This made students feel more comfortable discussing sensitive topics like child marriage and reproductive health rights.

Transformation of Teacher & Student

GEMA CITA didn’t just focus on students; it also had a profound impact on the teachers. One of the significant changes Pak Mamat implemented was transforming how teachers guided and interacted with students.

“At first, the methods my fellow teachers used were still quite traditional. When reprimanding students, they often used language and

Transformasi Guru & Siswa

Program GEMA CITA tidak hanya menyoal peserta didik, tetapi juga melibatkan guru-guru. Salah satu perubahan yang Pak Mamat terapkan adalah transformasi dalam cara pola pembinaan peserta didik.

“Pada awalnya, pola pembinaan yang diterapkan oleh kawan-kawan guru masih mengikuti pola lama, konvensional. Jadi, pada saat menegur peserta didik, seringkali menegur dengan gaya dan bahas yang tidak sesuai,” ujar Pak Mamat.

Namun, setelah mendapatkan pemahaman dari Program GEMA CITA terkait isu perlindungan anak, kekerasan terhadap anak, dan hak-hak anak, cara guru menegur dan memberi nasihat pada peserta didik pun berubah. Pak Mamat melihat adanya perubahan yang signifikan dalam cara rekan-rekannya sesama guru terkait pembinaan peserta didik—berfokus pada pendekatan yang lebih menghargai prinsip-prinsip hak anak dan penuh empati.

Menjaga Masa Depan Peserta Didik

Perubahan ini tidak hanya terasa di ruang kelas, tetapi juga membawa dampak yang lebih luas. Sebelum mengenal Program GEMA CITA, sekitar 20 peserta didik di sekolahnya terpaksa putus sekolah karena perkawinan anak. Namun, berkat komitmen Pak Mamat untuk mengubah pola asuh dan komunikasi di sekolah, serta pemahaman tentang hak anak serta pencegahan perkawinan anak yang terus menerus ia dorong di kalangan guru, jumlah peserta didik yang putus sekolah karena perkawinan anak mengalami penurunan drastis. Kini, hanya empat peserta didik yang terpaksa putus sekolah karena perkawinan anak, dan dua di antaranya bahkan masih tetap melanjutkan pendidikan mereka di sekolah terbuka—sebuah langkah yang sangat penting dalam menjaga masa depan mereka.

Meskipun angka ini menunjukkan kemajuan, Pak Mamat sadar bahwa tantangan masih ada.

Pak Mamat dan pihak sekolah terus berupaya agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah. Pak Mamat dan pihak sekolah terus mencari solusi bagi peserta didik yang terjebak dalam situasi sulit, misalnya jika terpaksa ada peserta didik yang perkawinannya tidak dapat dicegah

approaches that weren't always appropriate,” Pak Mamat explained.

However, after gaining insights from GEMA CITA on issues such as child protection, violence against children, and children's rights, teachers changed their approach. The shift was evident, as teachers began guiding students with more empathy and respect for children's rights.

Safeguarding the Future of Students

This transformation extended beyond the classroom, leading to a broader impact. Before GEMA CITA, around 20 students had dropped out due to child marriage. But thanks to Pak Mamat's commitment to improving the school environment and fostering open communication among teachers, the number of dropouts due to child marriage drastically decreased. Now, only four students had to leave school for child marriage reasons, and two of them even continued their education through open schooling—an important step in preserving their future.

Despite these improvements, Pak Mamat recognizes that challenges remain. He and the school's administration continue working tirelessly to prevent more students from dropping out. They explore solutions for students who find themselves in difficult situations, such as those experiencing child marriage or unplanned pregnancies. Pak Mamat and his team are always ready to support both students and their families in finding a way forward, suggesting students continue their education through open schooling to ensure their education continues despite their circumstances.

“Two students who married young were able to complete their education through open schooling. *Alhamdulillah*, they graduated,” Pak Mamat proudly shared.

For Pak Mamat, this is proof that with the commitment of all parties and by ensuring children receive their rights, even the most challenging situations can be overcome, and their future can still be saved. As the leader of his school, Pak Mamat firmly believes that independent initiatives to protect his students' futures, combined with open communication, are key to fostering positive change.

atau ditunda, atau bahkan mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Pak Mamat bersama tim sekolah selalu siap untuk mendampingi mereka dan melakukan pendekatan kepada peserta didik maupun orang tuanya dalam mencari jalan keluar. Salah satunya menyarankan agar anak tersebut tetap melanjutkan pendidikan di sekolah terbuka, menjaga agar proses belajar tetap berlangsung meskipun kondisi mereka berubah.

“Dua dari peserta didik yang telah menikah muda berhasil menyelesaikan pendidikan mereka melalui sekolah terbuka. Alhamdulillah sudah lulus, selesai sampai pendidikannya,” ujar Pak Mamat penuh rasa bangga. Mereka bahkan melanjutkan sekolah dan mendaftar ke SMA Terbuka.

Hal ini, menurut Pak Mamat, adalah bukti nyata bahwa dengan komitmen semua pihak dan memastikan anak mendapatkan haknya, masa depan anak-anak tetap bisa diselamatkan, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Sebagai seorang pemimpin di sekolahnya, Pak Mamat percaya bahwa inisiatif dan strategi mandiri untuk melindungi masa depan anak-anak di sekolahnya serta komunikasi yang terbuka dengan peserta didik adalah kunci menuju perubahan yang lebih baik.

Di sekolahnya, kini semakin sedikit peserta didik yang harus putus sekolah karena perkawinan anak, dan semakin banyak yang melihat pendidikan sebagai kunci masa depan mereka. Pak Mamat optimis dan terus berkomitmen untuk memastikan lebih banyak anak yang menyelesaikan pendidikan mereka dan terhindar dari perkawinan anak.

At his school, SMAN 1 Warung Kiara, fewer students are now dropping out due to child marriage, and more are seeing education as a gateway to their future. Pak Mamat remains optimistic and dedicated to ensuring that more students complete their education and avoid the trap of child marriage.





Pak Mamat berbincang dengan sejumlah peserta didik di SMAN 1 Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. Beliau mengadaptasi program GEMA CITA di sekolahnya. (Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)
Pak Mamat talks with several students at SMAN 1 Warungkiara, Sukabumi District. He has adapted the GEMA CITA Program in his school. (Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)







Napaah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lombok Barat. (Kredit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)

Napaah, Head of the Regional Technical Implementation Unit for Women and Children's Protection (UPTD PPA) in West Lombok District. (Credit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)

MEMPERKUAT KOLABORASI, BERSAMA MENANGANI PERKAWINAN ANAK

STRENGTHENING COLLABORATION TO END CHILD MARRIAGE

Sejak 2022, Kabupaten Lombok Barat telah mencatat adanya peningkatan laporan kasus perkawinan anak. Napaah (53), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lombok Barat, melihat peningkatan ini sejalan dengan peran penting koordinasi antara berbagai pihak maupun instansi dalam menangani kasus tersebut. Melalui Program GEMA CITA yang diinisiasi oleh Plan Indonesia, sinergi antarlembaga diperkuat, khususnya dengan adanya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di desa-desa yang menjadi kunci dalam mempercepat pelaporan dan penanganan kasus perkawinan anak.

Since 2022, West Lombok Regency has witnessed an increase in reports of child marriage cases. Napaah (53), Head of the Regional Technical Implementation Unit for Women and Children's Protection (UPTD PPA) in West Lombok District, recognized that this surge highlighted the need for stronger coordination among various institutions to address the issue. Through the GEMA CITA (End Child Marriage) Program, initiated by Plan Indonesia, inter-agency collaboration was significantly strengthened. A key element in this effort was the establishment of Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) in villages, which have played a crucial role in accelerating the reporting and handling of child marriage cases.



Napaah berjalan menuju ruang kerjanya. (Kredit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)
Napaah walks towards her office. (Credit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)



Napaah berdiskusi dengan rekan kerjanya mengenai kasus perkawinan anak di Lombok Barat.

(Kredit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)

Napaah discusses about child marriage cases in West Lombok District with her colleagues.

(Credit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)

Napaah menjelaskan bahwa kehadiran PATBM, yang didukung oleh program GEMA CITA, memperlancar aliran informasi dan kerja sama antara masyarakat, UPTD PPA, dan Lembaga lain yang terlibat. Dengan melibatkan kelompok masyarakat seperti remaja, kaum muda, perempuan, kepala dusun, kader Posyandu, dan tokoh desa, pelaporan kasus perkawinan anak dari desa-desa yang telah memiliki PATBM jauh lebih cepat diterima dibandingkan desa-desa yang belum terbentuk PATBM. Napaah menuturkan bahwa kehadiran PATBM sangat membantu, terutama karena saat ini UPTD PPA Kabupaten Lombok Barat memiliki keterbatasan sumber daya manusia.

“Hanya sekitar 7 orang ya. Itu pun untuk 10 kecamatan, 122 desa dan kelurahan”, kata Napaah.

Dengan jumlah tenaga yang terbatas, UPTD PPA juga bekerja sama dengan Lembaga Swadaya

Napaah explained that the presence of PATBM, supported by the GEMA CITA Program, has streamlined the flow of information and cooperation between the community, UPTD PPA, and other involved institutions. By engaging community groups such as youth, women, village heads, Posyandu cadres, and local leaders, reports of child marriage cases from villages with PATBM reach the authorities much faster compared to those without. Napaah pointed out that PATBM’s presence has been particularly valuable given the human resource limitations at UPTD PPA in West Lombok.

“There are only about seven staff members, and that’s to cover 10 districts and 122 villages and subdistricts,” Napaah explained.

With such limited personnel, UPTD PPA relies heavily on collaboration with NGOs and PATBM

Masyarakat (LSM) dan PATBM di tingkat desa untuk memperkuat koordinasi dan membantu penanganan kasus-kasus perkawinan anak. Napaah menjelaskan, ketika PATBM menerima laporan dari masyarakat, mereka akan mencoba menyelesaikan terlebih dahulu di tingkat PATBM. Jika PATBM tidak menemukan solusi, UPTD PPA kemudian akan turun tangan dan mengoordinasikan langkah lebih lanjut dengan kepala desa, kepolisian sektor (polsek), dan tokoh adat untuk proses mediasi.

Selain koordinasi lintas lembaga, UPTD PPA juga menyediakan layanan psikologis untuk memberi penguatan mental pada anak, terutama pada anak perempuan yang sering mengalami dampak secara mental. UPTD PPA juga memiliki Rumah Aman yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara untuk masa pemulihan psikologis korban, biasanya selama 14 hari tanpa dipungut biaya.

Penguatan Tenaga Pelaksana

Saat ini tenaga pelaksana di UPTD PPA masih sangat terbatas, dengan hanya tiga orang di lapangan, termasuk dirinya. Napaah—yang seharusnya berada di level koordinasi—harus ikut turut ke lapangan dalam proses pencegahan perkawinan anak. Idealnya, sesuai pedoman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), dibutuhkan 30 tenaga pelaksana yang terdiri dari ahli hukum, psikologi, kesehatan, dan pendidikan. Selain tenaga pelaksana yang masih sangat terbatas, Napaah menekankan pentingnya pelatihan yang berkelanjutan—baik untuk tim PATBM di desa maupun untuk UPTD PPA,—agar mereka lebih kompeten dalam menangani kasus-kasus perkawinan anak.

Oleh karena itu, baik tim PATBM maupun tim UPTD PPA perlu terus mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Meskipun usia UPTD PPA Kabupaten Lombok Barat baru berdiri sejak tahun 2022, Napaah berharap ke depannya jumlah tenaga pelaksana bisa memadai, dan UPTD PPA bisa mandiri dalam menangani kasus secara lebih efisien. Saat ini, dengan keterbatasan anggaran, mereka hanya bisa menjangkau setengah dari jumlah kasus yang dilaporkan. Namun, Napaah tetap berkomitmen, bahkan terkadang merogoh kocek sendiri demi

at the village level to strengthen coordination and assist in handling child marriage cases. Napaah noted that when PATBM receives a report from the community, they first attempt to resolve the issue at the village level. If the situation remains unresolved, UPTD PPA steps in, coordinating further actions with the village head, local police, and community leaders to mediate the case.

In addition to cross-institutional coordination, UPTD PPA provides psychological services to strengthen the mental resilience in affected children, particularly girls who often bear the emotional burden. UPTD PPA also offers a Safe House, providing temporary shelter for victims during their psychological recovery, typically for up to 14 days, at no cost.

Strengthening Human Resources

Currently, the staffing shortage at UPTD PPA is critical, with only three field officers, including Napaah herself. Ideally, Napaah's role would focus on coordination, but due to limited staff, he frequently goes into the field to help prevent child marriages. According to Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA) guidelines, an effective team requires 30 professionals, including legal experts, psychologists, healthcare workers, and educators, to handle child marriage cases adequately. Napaah emphasized the importance of continuous training for both PATBM and UPTD PPA teams to improve their competence in managing such cases.

Continuous training is essential to enhance the team's effectiveness. Although UPTD PPA was established only in 2022, Napaah hopes that eventually, the UPTD PPA will have sufficient staff to manage cases more efficiently. With current limited funding, they can only address about half of the reported cases. However, Napaah's dedication remains committed, and she sometimes uses her own money to ensure children and youth are protected.

GEMA CITA & The Child Marriage Prevention System

Napaah highlighted the critical role that GEMA CITA plays in strengthening the coordination between PATBM and UPTD PPA. The program



Napaah berdiskusi dengan rekan kerjanya mengenai penanganan kasus perkawinan anak di Kabupaten Lombok Barat. (Kredit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)
Napaah discusses the handling of child marriage cases in West Lombok with her colleagues. (Credit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)

memastikan perlindungan terhadap anak dan kaum muda dapat terus berjalan.

GEMA CITA & Sistem Pencegahan Perkawinan Anak

Napaah menyoroti pentingnya peran GEMA CITA dalam memperkuat koordinasi antara PATBM dan UPTD PPA. Program GEMA CITA telah membawa dampak signifikan, tidak hanya dalam pelaporan dan penanganan kasus, tetapi juga dalam peningkatan kapasitas komunitas dan pengurangan rantai penanganan kasus yang seharusnya ditangani oleh UPTD PPA. Menurut Napaah, dengan dukungan dari GEMA CITA, PATBM dapat menyelesaikan lebih banyak kasus di tingkat desa sebelum harus melibatkan UPTD PPA.

has had a significant impact, not only in reporting and managing cases but also in building community capacity and reducing the number of cases that require UPTD PPA intervention. Thanks to GEMA CITA's support, PATBM can resolve many cases at the village level before they escalate to UPTD PPA.

Based on their field experience with various child marriage cases, Napaah and her UPTD PPA team have developed strategies to prioritize cases, particularly those requiring psychological services. In urgent situations, Napaah swiftly coordinates with the local police to secure funding for these psychological services and ensure the availability of a Safe



Selain itu, berbekal pengalaman di lapangan dengan beragam kasus perkawinan anak, Napaah dan tim UPTD PPA Kabupaten Lombok Barat kini lebih memahami bagaimana membuat skala prioritas penanganan kasus, terutama yang memerlukan layanan psikologis. Dalam situasi mendesak, Napaah biasanya langsung berkoordinasi dengan polres setempat untuk mendapatkan dana bagi layanan psikolog dan memastikan tersedianya Rumah Aman bagi anak dan kaum muda yang membutuhkan perlindungan sementara.

Sinergi yang Berkelanjutan

Napaah optimis bahwa melalui Program GEMA CITA, sinergi antara PATBM, UPTD PPA, dan berbagai pemangku kepentingan akan semakin kuat sehingga memungkinkan sistem pencegahan perkawinan anak yang lebih efektif di masa mendatang.

Meskipun tantangan tetap ada, kerja sama lintas sektor yang terus diperkuat akan memastikan perlindungan anak yang lebih baik, memastikan masa depan yang lebih cerah bagi anak dan kaum muda di Kabupaten Lombok Barat.

House for children and youth in need of temporary protection.

Sustaining Synergy

Napaah remains optimistic that, with the continued support of GEMA CITA Program, the synergy between PATBM, UPTD PPA, and various stakeholders will continue to grow, creating a more robust child marriage prevention system in the future.

While challenges persist, the ongoing cross-sector collaboration ensures that child protection in West Lombok District will improve, paving the way for a brighter future for children and youth in West Lombok District.



Baltasar Va, Kepala Sekolah SMPN 1 Aesesa Selatan sekaligus Ketua KPPAD Desa Tengtatiba, Kabupaten Nagekeo. (Kredit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)

Baltasar Va, Principal of SMPN 1 Aesesa Selatan and Chairperson of the Village Child Protection Agency (KPPAD) in Tengtatiba Village, Nagekeo District. (Credit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)

SINERGI EDUKASI

DAN REGULASI

ALIGNING EDUCATION AND REGULATION

Baltasar Va (59), yang lebih dikenal sebagai Pak Bas, adalah sosok pendidik yang telah mengabdikan hidupnya untuk kemajuan dan kesejahteraan anak dan kaum muda di Desa Tengtiba, Kabupaten Nagekeo. Sejak memulai kariernya sebagai pendidik pada tahun 1992, kemudian diangkat menjadi guru pada tahun 2000, Pak Bas telah menempuh perjalanan panjang hingga akhirnya ia menjadi Kepala Sekolah SMPN 1 Aesesa Selatan. Perannya tidak berhenti di situ, ia juga mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Semua tanggung jawab ini dijalankannya dengan tujuan mulia: memajukan pendidikan dan melindungi masa depan anak dan kaum muda di desanya.

Baltasar Va (59), known as Pak Bas, has devoted his life to advancing the well-being of children and youth in Tengtiba, a village in Nagekeo District. His journey, which began as an educator in 1992 and evolved into a full-time teacher by 2000, has been marked by continuous service. Now, in his role as the Principal of SMPN 1 Aesesa Selatan, the Chair of the School Principals' Working Group (MKKS), and a member of the Village Deliberation Council (BPD), Pak Bas embodies unwavering commitment to improving education and safeguarding the future of the youth in his community.



Salah satu materi kampanye mengenai pencegahan perkawinan anak. (Kredit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)
One of the campaign materials on child marriage prevention. (Credit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)



Baltasar Va menyampaikan materi kepada rekan-rekannya sesama guru tentang Sekolah Ramah Anak dan peran para pendidik dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Nagekeo.

(Kredit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)

Baltasar Va presents material to fellow teachers on Child-Friendly School and the role of educators in preventing child marriage in Nagekeo District. (Credit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)

Perannya sebagai pendidik hanyalah salah satu aspek dari kontribusi Pak Bas. Pada tahun 2017, Pak Bas diberi amanah sebagai Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Tengtatiba. Tugas ini memperluas jangkauan pengabdianya, khususnya dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan sekolah. Berbekal pengalamannya sebagai pendidik, Pak Bas memiliki kepekaan yang tajam terhadap isu-isu kekerasan yang dialami anak. Kemampuannya mengintegrasikan perannya sebagai kepala sekolah dan Ketua KPPAD memungkinkannya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak dan kaum muda maupun peserta didik di sekolah yang ia pimpin.

Komitmen Pak Bas terhadap perlindungan anak semakin diperkuat dengan kehadiran Program GEMA CITA yang diinisiasi oleh Plan Indonesia pada bulan November 2023. Ia sangat menyambut baik dan menerima kehadiran Program GEMA CITA dengan tangan terbuka. Program ini membuka peluang baginya untuk lebih dalam lagi mengedukasi masyarakat tentang hak-hak anak, pencegahan perkawinan anak, dan dampaknya.

“Bagi saya, program ini bukan sekadar kepedulian dalam pencegahan perkawinan anak dan

Yet, his role as an educator is just one facet of his contributions. In 2017, Pak Bas was appointed as Chair of the Regional Child Protection and Supervision Commission (KPPAD) in Tengtatiba, expanding his focus into the realm of child protection. With decades of teaching experience, he is particularly sensitive to issues of violence against children. His dual responsibilities—as a school principal and KPPAD chair—enables him to foster a safer, more supportive environment for children, both in schools and across the village.

The launched of the GEMA CITA (End Child Marriage) Program in 2023 in Tengtatiba strengthened his commitment to protecting children. Pak Bas embraced the program, which allowed him to further educate the community on children’s rights, child marriage prevention, and its long-term impacts.

“For me, this program is not just about preventing child marriage and securing children’s futures—it’s about doing the right thing for humanity,” he reflected.

With the arrival of GEMA CITA in his village, Pak Bas became even more determined to raise awareness about child marriage prevention. As the head of



Para guru dan beberapa staf di lingkungan SMPN 1 Aesesa Selatan mengikuti pemaparan tentang Sekolah Ramah Anak serta diskusi mengenai upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Nagekeo.

(Kredit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)

Teachers and staff at SMPN 1 Aesesa Selatan participate in a presentation on Child-Friendly School and a discussion on efforts to prevent child marriage in Nagekeo District. (Credit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)

masa depan anak, tapi juga hal baik untuk kemanusiaan,”ujarnya.

Dengan hadirnya Program GEMA CITA di desanya, Pak Bas semakin fokus dalam menyampaikan edukasi mengenai pencegahan perkawinan anak dan dampaknya. Sebagai Ketua MKKS, Pak Bas menggunakan setiap kesempatan—baik itu rapat dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, maupun forum guru—untuk menekankan pentingnya menjaga anak dan kaum muda dari perkawinan anak dan kehamilan tidak diinginkan.

Keterbatasan Sumber Daya dan Finansial

Di tengah kesibukannya sebagai kepala sekolah dan Ketua KPPAD, Pak Bas juga aktif berperan sebagai anggota BPD. Bersama anggota BPD lainnya, ia turut aktif dalam pembahasan dan penyepakatan Rancangan Perdes, khususnya dalam merumuskan kebijakan desa yang inklusif. Peran ini memberinya kesempatan untuk memperjuangkan alokasi dana yang tepat untuk mendukung program-program dan kegiatan yang berfokus pada kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pak Bas memahami bahwa mengalokasikan anggaran yang memadai untuk KPPAD bukanlah

MKKS, he used every opportunity—whether it was meetings with parents, school committees, and teacher forums—to emphasize the importance of protecting children and youth from the risks of child marriage and unintended pregnancies.

Overcoming Resource and Financial Constraints

Amid his responsibilities as a school principal and Chair of KPPAD, Pak Bas also serves as an active member of the Village Deliberation Council (BPD). Along with other BPD members, he plays a key role in discussions and the formulation of Village Regulations (Perdes), particularly in developing inclusive policies for the village. This position enables him to advocate for the proper allocation of funds to support programs and initiatives dedicated to the welfare and protection of children.

Despite his many roles and responsibilities, Pak Bas was acutely aware of the financial challenges faced by KPPAD. Initially, operational funds were collected through community donations. “We called it *‘uang cuitan’* (coin funds) where each person contributed a thousand rupiah. But this was not enough to support our operational needs,” Pak Bas explained.

perkara mudah. Semula, untuk pendanaan operasional KPPAD, dikumpulkan secara swadaya dari kesadaran warga. “Kita inisiatif saja. Kita menyebutnya ‘uang cuitan’, masing-masing seribu rupiah. Tetapi dana ini tidak maksimal untuk dana operasional,” kata Pak Bas.

Membangun Dasar Hukum yang Kuat

Tanpa regulasi yang kuat, program perlindungan anak tidak akan memiliki dasar hukum yang kokoh—termasuk alokasi anggaran. Hal ini disadari benar oleh Pak Bas. Ia tak menyerah. Pak Bas lantas mulai bergerak dengan mengedukasi masyarakat dan pemerintah desa tentang pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan; bahwa isu perlindungan anak perlu perhatian yang layak dalam setiap keputusan anggaran desa agar alokasi anggaran untuk program ini dapat diakomodasi dalam RAPBDes (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

“Dari tahun 2015 hingga 2016, program-program untuk pencegahan perkawinan anak dan kehamilan tidak diinginkan sebenarnya sudah ada, tetapi kami kesulitan di bagian dana,” kenang Pak Bas. Sebetulnya di tahun 2016 telah terbit Perda yang mengatur tentang perlindungan anak Nagekeo (Perda No. 11 Tahun 2016) di mana Pemda melalui Surat Edaran Bupati akhirnya mengalokasikan dana desa bagi operasional KPPAD, termasuk KPPAD Tengtiba. Dana operasional ini tentu terbatas karena harus dibagi dana operasional dengan KPPAD desa-desa lainnya.

Untuk memperkuat dukungan finansial, Pak Bas pun mendorong adanya Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur alokasi dana desa di Desa Tengtiba. Baginya, hal ini sangat penting karena upaya-upaya pencegahan perkawinan anak ini idealnya tidak hanya diperkuat secara finansial untuk kebutuhan operasional KPPAD, tetapi juga diperkuat oleh regulasi.

“Prosesnya panjang dan dengan pendampingan dari Plan Indonesia, Desa Tengtiba berhasil merumuskan Perdes yang mengatur alokasi dana desa untuk kegiatan KPPAD. Dengan adanya Perdes, kepala desa harus bisa merespons dan mengalokasikan anggaran untuk keberlangsungan kegiatan KPPAD,” ujar Pak Bas menjelaskan.

Building a Strong Legal Framework

Pak Bas recognized that without strong regulations, child protection efforts would lack the necessary legal foundation, particularly when it came to funding. Undeterred by the challenges, he began educating the community and village officials on the importance of child protection and advocated for its inclusion in village budget decisions. His goal was to ensure that funds for child protection programs were allocated in the RAPBDes (Village Budget Plan) and RKPDes (Village Development Plan).

“From 2015 to 2016, we already had programs addressing child marriage prevention and unintended pregnancies, but funding was a major issue,” Pak Bas recalled. Although Nagekeo’s Regional Regulation (Perda) No. 11/2016 on child protection had been established, local implementation was still limited. While a mayoral decree had allocated village funds for KPPAD operations, they were spread thin across several villages.

Determined to secure stronger financial backing, Pak Bas advocated for a Village Regulation (Perdes) in Tengtiba, mandating the allocation of village funds specifically for KPPAD activities. He emphasized that this regulation would not only provide financial support but also give KPPAD the legal framework it needed.

“The process was long, but with support from Plan Indonesia, Tengtiba successfully drafted a village regulation that mandated the allocation of funds for KPPAD activities. With this regulation, village leaders must respond by allocating the necessary funds,” Pak Bas explained.

The number of participants reflected a balanced gender composition: 26 adult men, 14 adult women, 4 young men, 4 young women, and 2 young girls. Although no boys were involved, this demonstrates a strong effort to ensure the participation of women and girls, marking an important step toward addressing gender equality issues in the village.



Baltasar Va mencatat hasil diskusi dan beberapa masukan dari para guru serta staf sekolah SMPN 1 Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, usai menyampaikan materi tentang pencegahan perkawinan anak dan dampaknya. (Kredit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)
 Baltasar Va takes notes from the discussion and feedback from the teachers and staff at SMPN 1 Aesesa Selatan, Nagekeo District, after presenting on the efforts to prevent child marriage and its impacts. (Credit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)



Baltasar Va menyampaikan materi kepada para guru dan staf di SMPN 1 Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, tentang pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif bagi peserta didik. (Kredit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)
 Baltasar Va presents material to the fellow teachers and staff at SMPN 1 Aesesa Selatan, Nagekeo District, on the importance of creating a positive and inclusive learning environment for students. (Credit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)



Para guru dan staf SMPN 1 Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, mengikuti pemaparan tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak dan dampaknya. (Kredit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)
 Teachers and staff at SMPN 1 Aesesa Selatan, Nagekeo District, participate in a presentation on the importance of preventing child marriage and its impact. (Credit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)

Dalam perumusan Perdes, mereka juga melibatkan anak dan kaum muda melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Jumlah peserta yang hadir mencerminkan komposisi gender yang seimbang: 26 laki-laki dewasa, 14 perempuan dewasa, 4 kaum muda laki-laki, 4 kaum muda perempuan, serta 2 anak perempuan. Meskipun belum ada keterlibatan anak laki-laki, hal ini menunjukkan upaya yang serius untuk memastikan keterlibatan perempuan dan anak perempuan dalam proses ini, sebuah langkah penting dalam mengatasi isu kesetaraan gender di desa.

Usaha Pak Bas tak sia-sia. Berkat adanya pendampingan dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah desa dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), di periode ke-2 kepemimpinannya sebagai Ketua KPPAD, pada bulan Juni tahun 2024 akhirnya ditetapkan Perdes No. 2 Tahun 2024 tentang perlindungan perempuan dan anak di desa di mana di dalamnya termaktub pasal yang mengatur tentang tanggung jawab pemerintah desa untuk menyiapkan anggaran tiap tahunnya.

“Kami berhasil mendapatkan alokasi dana desa sebesar 2,5 juta per tahun untuk biaya operasional KPPAD,” ungkapnya. Dana

In June 2024, Village Regulation (Perdes) No. 2/2024 on the protection of women and children was enacted, legally binding the village government to allocate funds annually.

“We successfully secured an annual allocation of 2.5 million rupiah for KPPAD’s operational costs,” he said. These funds support community outreach, child protection campaigns, and child marriage prevention efforts, including case management. By 2024, the village increased the operational budget to 3 million rupiah per year—a significant step forward.

Securing a Legacy for Future Generations

As he approaches his retirement as principal, Pak Bas is working to that the foundations he has built will endure. In teacher forums, he regularly encourages his colleagues to take proactive steps in preventing all forms of violence within the school environment. These discussions are part of the school’s bi-weekly evaluations, where educators collaborate to develop collective solutions.

Within KPPAD, now in his second term as chair, Pak Bas has laid the groundwork for sustained progress. His strategy centers on three key pillars: continuing to raise awareness about child

operasional ini digunakan untuk sosialisasi, kampanye perlindungan perempuan dan anak, serta pencegahan perkawinan anak, termasuk pendampingan kasus. Kegiatan sosialisasi dan kampanye ini mencakup sekolah-sekolah, posyandu, dusun-dusun, dan kunjungan keluarga. Salah satu pencapaian lain yang cukup menggembirakan adalah di tahun 2024 ini, anggaran operasional KPPAD meningkat menjadi 3 juta per tahun.

Menjaga Warisan untuk Generasi Mendatang

Menjelang purnatugas sebagai kepala sekolah, Pak Bas memastikan bahwa fondasi yang telah ia bangun tidak akan runtuh. Melalui forum guru, ia senantiasa mendorong para guru untuk mengambil langkah proaktif dalam mencegah segala bentuk kekerasan di lingkungan sekolah. Diskusi ini menjadi bagian dari evaluasi rutin dua mingguan sebagai ruang diskusi dan mengembangkan solusi bersama.

Sedangkan di KPPAD, di periode ke-2 kepemimpinannya, Pak Bas telah menyiapkan suatu keberlanjutan melalui sistem yang telah ia bangun bersama teman-teman KPPAD. Yakni, pertama, terus-menerus membangun pemahaman pada masyarakat tentang perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak. Kedua, membangun komunikasi intens dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar isu pencegahan perkawinan anak semakin kuat. Ketiga, memastikan bahwa Perdes yang telah dirumuskan terus diimplementasikan secara konsisten.

Warisan Pak Bas adalah bukti nyata bahwa dengan kerja sama yang berkelanjutan, komitmen yang teguh, dan regulasi yang kuat, dapat menciptakan sebuah jalan menuju masa depan anak dan kaum muda di Desa Tengtiba tetap cerah dan terlindungi.

Salah satu guru di SMPN 1 Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, membaca materi tentang upaya pencegahan perkawinan anak. (Kredit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)
One of the teachers at SMPN 1 Aesesa Selatan, Nagekeo District, reads material on efforts to prevent child marriage. (Credit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)

protection and child marriage prevention, fostering strong communication with stakeholders to strengthen advocacy, and ensuring the consistent implementation of the village regulation.

Pak Bas's legacy is a testament to the power of sustained collaboration, firm commitment, and a robust legal framework. His work has paved the way for a brighter, safer future for the children and youth of Tengtiba—one where their rights are protected and their potential can be fully realized.





Heni Suryani, Ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Margaluyu, Kabupaten Sukabumi. (Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)
Heni Suryani, Chairperson of the Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) in Margaluyu Village, Sukabumi District. (Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)

MENGURAI SENGGARUT

PERKAWINAN ANAK

UNTANGLING THE COMPLEXITY OF CHILD MARRIAGE

Heni Suryani (44) adalah sosok perempuan yang tidak mudah menyerah. Sebagai Ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Margaluyu, Kabupaten Sukabumi, Heni telah melakukan hal-hal luar biasa dan berperan aktif dalam mencegah perkawinan anak. Dengan tekad yang kuat, ia tak ragu untuk langsung bergerak dari rumah ke rumah, mengunjungi dan menemui setiap warga yang berencana menikahkan anak mereka dan menghentikan praktik perkawinan anak yang telah merenggut masa depan generasi muda.

Heni Suryani (44) is a woman of resilience. As the Chairperson of the Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) in Margaluyu Village, Sukabumi District, Heni has taken extraordinary steps and played an active role in preventing child marriages. With unwavering determination, she tirelessly visits homes, meeting with families who are planning to marry off their children, and works to stop child marriages that threaten the future of the younger generation.



Heni berbicara dengan rekannya di kantor desa sebelum mengunjungi warga di Desa Margaluyu, Kabupaten Sukabumi. (Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)
Heni chats with her colleague at the village office before visiting residents in Margaluyu Village, Sukabumi District. (Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)

Awalnya, Heni hanya seorang guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Namun, hidupnya berubah ketika desa mempercayakan padanya tanggung jawab baru: menjadi kader Posyandu. Ketika Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) terbentuk di desanya, Heni yang memang mencintai dengan dunia anak-anak, lantas mengambil inisiatif menjadi Ketua PATBM. Peran ini mengubah jalur hidupnya. Heni lantas menjadi lebih dari sekadar guru dan kader Posyandu. Kini ia berperan aktif dalam pencegahan perkawinan anak.

Bagi Heni, perkawinan anak adalah realita pahit yang tidak bisa ia terima begitu saja. Di Kabupaten Sukabumi, angka perkawinan anak cukup tinggi, termasuk di Desa Margaluyu. Setiap tahun, tercatat sekitar 10 kasus perkawinan anak di desa ini. Faktor ekonomi, putus sekolah, dan minimnya pengawasan orang tua hanyalah sebagian dari alasan di balik angka statistik yang mengkhawatirkan Heni dan masyarakat di desanya. Ditambah lagi dengan adanya praktisi agama yang kurang memahami isu tentang perkawinan anak dan dampaknya.

Ketika Program Generasi Emas Bangsa Bebas Perkawinan Usia Anak (GEMA CITA) hadir di Sukabumi pada tahun 2022, Heni merasa mendapatkan dukungan yang sangat ia butuhkan. Dengan pendampingan intensif dari Plan Indonesia serta pelatihan pada masyarakat, Heni dan Tim PATBM di desanya berhasil menurunkan jumlah laporan perkawinan hampir 50 persen di tahun 2024. Bahkan dari enam laporan perkawinan anak yang masuk, Heni dan Tim PATBM berhasil menunda empat perkawinan anak. Rata-rata usia anak yang hendak melakukan perkawinan anak tersebut berkisar antara 17 hingga 18 tahun. Heni meyakini bahwa upaya-upaya ini bukan sekadar angka; ini adalah menyelamatkan masa depan anak dan kaum muda dari perkawinan anak.

Pendekatan Kolaboratif

Heni yang pemberani dan tidak mudah menyerah sangat bertolak belakang dengan sosok Heni dua tahun silam. Ketika pertama kali mendengar tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak melalui Program GEMA CITA, Heni awalnya merasa bahwa isu ini bukanlah tanggung jawabnya. Namun, setelah mengikuti berbagai pelatihan dan



Heni duduk di atas sepeda motor yang dikendarai rekannya, menuju rumah seorang warga di Desa Margaluyu, Kabupaten Sukabumi. (Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)
Heni is given a ride on a motorcycle to visit a resident in Margaluyu Village, Sukabumi District. (Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)



Heni's journey began as a preschool teacher, working in early childhood education (PAUD). But her patch changed when the village entrusted her with a new responsibility as Posyandu (community-based healthcare) cadre. When the PATBM was established in her village, Heni, already committed to children's welfare, took on the role of Chairperson. This role marked a turning point in her life, transforming her from an educator and health worker into a key figure in preventing child marriage.

For Heni, child marriage is a harsh reality she refuses to accept. In Sukabumi District, the rates of child marriage are alarmingly high, including in Margaluyu Village, with around 10 cases of child marriage reported in her village alone. Economic hardship, school dropouts, and lack of parental supervision are some of the drivers behind these statistics, which deeply concern Heni and her community. Compounding this, some religious leaders remain unaware of the issues surrounding child marriage and its consequences.

When GEMA CITA (End Child Marriage) Program launched in Sukabumi in 2022, Heni felt she had finally found the support she needed. With intensive assistance from Plan Indonesia and community training, Heni and her PATBM team managed to reduce reported child marriage cases by nearly 50% by 2024. Of the six reported cases that year, Heni and her team successfully postponed four. The average age of those involved ranged between 17 and 18. For Heni, this is more than statistics—they represent saving the futures of children and young people from the threat of child marriage.

A Collaborative Approach

Once reserved, Heni is now relentless in her fight—far from the person she was two years ago. At first, when she heard about the importance of preventing child marriage through the GEMA CITA Program, she felt it wasn't her responsibility. However, after attending training sessions and receiving guidance from Plan Indonesia, she realized the importance of her role in protecting the youth in her village. This realization sparked her journey to lead PATBM in Margaluyu.

mendapatkan pendampingan dari Plan Indonesia, pandangannya berubah. Ia menyadari betapa pentingnya peran yang bisa ia lakukan dalam melindungi masa depan anak dan kaum muda di desanya. Heni akhirnya memutuskan untuk terlibat langsung dan ini pula yang mengawali kisah Heni untuk menjadi mengambil inisiatif menjadi Ketua PATBM di Desa Margaluyu.

Di PATBM, Heni tidak bergerak sendirian. Bersama 25 anggota PATBM lainnya yang terdiri dari kader Posyandu, PKK, dan pendidik sebaya (*peer educator*), Heni bekerja sama dengan penuh koordinasi. Mereka tersebar di empat dusun, saling bekerja sama, mendukung, dan menguatkan satu sama lain. Setiap hari, Heni dan timnya menerima informasi terbaru dari warga, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga kepala RT dan RW. Berbekal informasi tersebut, Heni dan Tim PATBM turun langsung mengunjungi keluarga-keluarga yang berencana menikahkan anak mereka di usia anak.

Heni juga memastikan agar masyarakat mendapatkan edukasi dan pemahaman mengenai perkawinan anak. Heni dan Tim PATBM lantas merancang strategi agar edukasi mengenai pencegahan perkawinan anak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Salah satu caranya adalah melalui pendataan keluarga, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk berdialog dengan orang tua.

“Kita banyak melakukan pendataan keluarga. Biasanya kan ada satu anak gadis tuh. Ini jangan dinikahin dulu,” pesan Heni kepada orang tua si anak gadis saat ia melakukan pendataan. Heni tahu bahwa perubahan tidak mudah. Saat mengedukasi warga, ia memilih pendekatan yang hati-hati dan penuh empati untuk menghindari resistensi dari masyarakat.

“Kalau nggak pelan-pelan banget, mereka malah balik keras ke kita,” ujar Heni menambahkan.

Tantangan terbesar yang ia hadapi adalah budaya dan keyakinan yang sangat kental di masyarakat. Banyak orang tua yang masih menikahkan anak-anak mereka meskipun sudah diberi pemahaman mengenai dampak negatif perkawinan anak. Tak terhitung berapa kali Heni menerima penolakan saat mengedukasi masyarakat. “Kita nikahin nggak

Heni doesn’t work alone. She collaborates with 25 other PATBM members, including Posyandu cadres, PKK (family welfare movement) members, and peer educators—they coordinate and support one another. Spread across four villages, they continuously receive updates from the community, including from religious leaders, community figures, and neighborhood heads. With this insight, Heni and her team visit families planning to marry off their children.

Heni also ensures that the community is well-informed about the risks. The PATBM team designs strategies to spread awareness across all layers of society, starting by collecting family data as a basis to facilitate discussions with parents.

“We conduct a lot of family data collection. If there’s a young girl, we advise the parents: ‘Don’t marry her off yet,’” Heni explains. She knows that creating change takes patience, especially when educating the community.

“If we don’t approach it slowly, they’ll resist even more,” Heni adds.

The biggest challenge Heni faces is overcoming deeply ingrained cultural and religious beliefs within the community. Many parents still pursue child marriage, even after being educated about the harmful consequences. She often encounters resistance, with families asking, “We won’t ask you to cover the costs. Do you want to bear the sin?”—this is the kind of pushback she often receives.

But Heni remains undeterred. She continues visiting homes, searching for ways to reach the hearts of parents. One of her most effective strategies is to explain the importance of official documents for marriage. She informs families that to get married, they need complete legal documents. If the child is under the legal minimum marriage age—according to the Marriage Law No. 16 of 2019—the marriage won’t be approved by the Office of Religious Affairs (KUA).

If parents persist, Heni explains the broader implications: without a legal marriage certificate, their child’s future access to critical administrative services—such as family registration cards, birth certificates, health insurance (BPJS), and even



Heni bersama rekannya berbincang dengan seorang warga di Desa Margaluyu, Kabupaten Sukabumi.

(Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)

Heni and her colleague talk with a resident in Margaluyu Village, Sukabumi District.

(Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)

bakalan minta biaya ke kalian. “Emang kalian mau nanggung dosanya?”—begitulah ucapan beberapa orang tua yang pernah dilontarkan ke dirinya.

Namun, Heni tidak menyerah. Ia terus berkunjung ke rumah-rumah warga, mencari cara lain untuk menyentuh hati para orang tua. Ia memutar otak, mencari cara dan pendekatan lain. Salah satu pendekatan yang ia gunakan adalah menjelaskan pentingnya dokumen resmi untuk melangsungkan pernikahan. Heni lantas memberi tahu warga bahwa agar dapat melangsungkan pernikahan, mereka wajib memiliki dokumen yang lengkap. Jika usia anak tidak sesuai dengan batas usia minimal menikah—berdasarkan undang-undang perkawinan no. 16 Tahun 2019—pernikahan tidak akan disetujui oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Jika orang tua bersikukuh tetap melangsungkan perkawinan anak, Heni menjelaskan bahwa anak yang menikah di usia anak tidak akan memiliki buku nikah, yang berimbas pada pengurusan administrasi lainnya, seperti kartu keluarga,

government social assistance—will be limited. This practical approach often resonates with families, gradually shifting their views. Once families understand that child marriage could obstruct access to vital administrative services, they gradually begin to accept Heni’s message.

Since July 2022, the education and outreach efforts led by Heni and the PATBM team have started to bear fruit. Religious leaders who once insisted that children who have reached puberty could marry have begun to reconsider, acknowledging the importance of preventing child marriage. Local Religious Affairs Offices (KUA) officials have also become more selective, refusing to officiate marriages involving underage couples. However, challenges remain, as some families still marry off their children in neighboring villages where child marriage education has not yet reached.

Despite these hurdles, Heni and her PATBM team remain steadfast. After two years of hard work, Heni submitted a funding proposal to the village government. In 2024, her persistence paid off—

akte kelahiran, kartu BPJS, dan bahkan bantuan sosial dari pemerintah. Pendekatan ini terbukti lebih efektif. Ketika warga memahami bahwa perkawinan anak bisa menghambat akses ke administrasi penting dan mendapatkan bantuan pemerintah, mereka perlahan mulai menerima pemahaman yang diberikan oleh Heni.

Sejak Juli 2022, edukasi dan sosialisasi yang telah dilakukan Heni dan Tim PATBM mulai memperlihatkan titik cerah. Heni juga banyak menjumpai tokoh-tokoh agama. Praktisi agama yang sebelumnya bersikukuh bahwa anak yang sudah aqil balik boleh menikah, kini mulai terbuka terhadap pemahaman pentingnya mencegah perkawinan anak. Para penghulu KUA juga lebih selektif dan mulai menolak pasangan yang belum memenuhi usia nikah. Namun, tantangan masih ada; beberapa pelaku perkawinan anak memilih melangsungkan pernikahan di desa lain yang belum terpapar edukasi mengenai dampak perkawinan anak.

Membangun Kesadaran Kolektif

Meski masih ada tantangan, Heni dan Tim PATBM tidak mundur. Setelah dua tahun berjuang, Heni memberanikan diri mengajukan proposal pendanaan ke pemerintah desa. Pada tahun 2024, jerih payahnya membuahkan hasil. Pemerintah desa akhirnya mengalokasikan anggaran 17 juta rupiah selama setahun untuk PATBM.

Di tahun 2024 ini, PATBM juga telah mengadakan edukasi di empat dusun dengan fokus utama memberikan pemahaman kepada warga mengenai dampak perkawinan anak. Banyak warga yang belum memahami dampak negatif perkawinan anak, sehingga edukasi ini menitikberatkan pada edukasi tentang risiko kesehatan, psikologis, dan sosial bagi anak yang menikah di bawah usia 19 tahun. Heni juga menggunakan kesempatan ini untuk menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawab PATBM, sehingga warga memahami bahwa imbauan untuk tidak menikahkan anak di bawah usia 19 tahun bukanlah bentuk intimidasi, melainkan tugas dan wewenang yang diamanahkan Heni sebagai bagian dari pemerintah desa.

the village allocated 17 million rupiah annually to support PATBM activities.

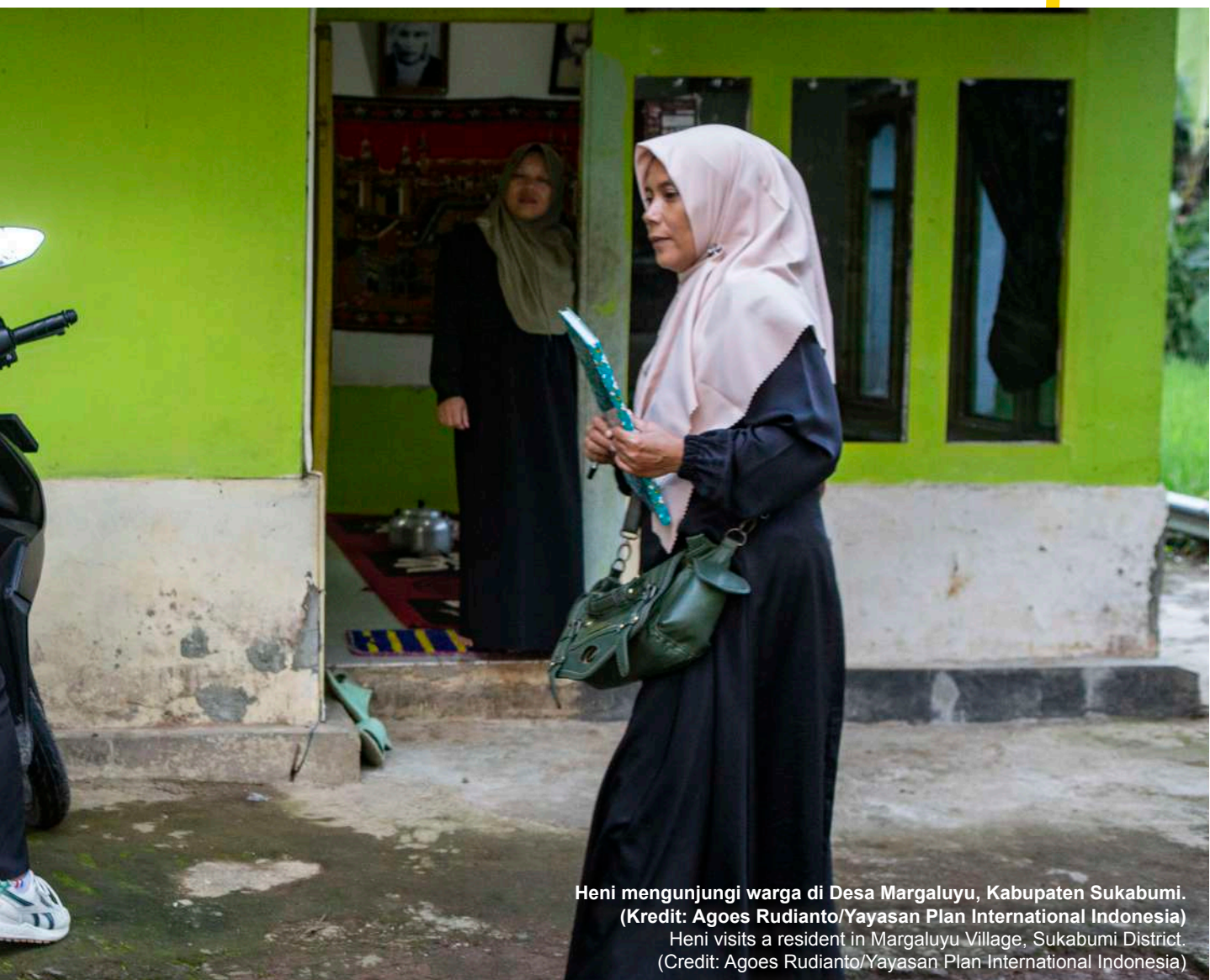
That same year, PATBM also conducted educational programs across four villages, focusing on raising awareness about the health, psychological, and social risks of child marriage. Many residents were unaware of the harmful consequences, so this initiative aimed to educate families. Heni also emphasized that PATBM's role is not to intimidate families but to fulfill its responsibility in protecting children, as part of its duty in village governance.

In addition to securing funding, conducting outreach, and providing education, Heni continues for the establishment of a Village Regulation (Perdes) on child marriage prevention. She engages local authorities to engage in dialogue with religious leaders and



Selain memperjuangkan soal anggaran, serta melakukan sosialisasi dan edukasi, Heni juga masih terus mendorong pemerintah desa untuk menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) tentang pencegahan perkawinan anak. Bahkan Heni tak segan-segan mengajak pemerintah desa untuk membuka dialog dengan tokoh-tokoh agama dan bermusyawarah dengan warga. Hal ini penting agar penerbitan Perdes dapat diselaraskan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat sehingga tidak terjadi benturan dan resistensi. Harapannya, melalui dialog-dialog inilah muncul kesepahaman yang kuat dan komitmen bersama untuk melindungi anak dan kaum muda dari perkawinan usia anak. Melalui langkah-langkah ini, Heni dan PATBM berupaya memastikan upaya pencegahan perkawinan anak di desa mereka terus berlanjut dan menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat.

residents, ensuring that any regulation reflects community values to minimize resistance. Heni's ultimate goal is to embed the prevention of child marriage into the village's collective consciousness, ensuring that protecting children becomes a shared responsibility.



Heni mengunjungi warga di Desa Margaluyu, Kabupaten Sukabumi.
(Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan Internasional Indonesia)
Heni visits a resident in Margaluyu Village, Sukabumi District.
(Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan Internasional Indonesia)



Ganevo, project officer program GEMA CITA oleh Plan Indonesia di Kabupaten Lombok Barat.
(Kredit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)
Ganevo, Project Officer of the GEMA CITA program by Plan Indonesia in West Lombok District.
(Credit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)

MENGGEMAKAN SUARA

REMAJA DAN KAUM MUDA

EMPOWERING YOUTH VOICES FOR LASTING CHANGE

Di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, masalah perkawinan anak terasa seperti tantangan yang tak mudah untuk diatasi. Suara masyarakat, terutama para remaja dan kaum muda, sering kali teredam oleh tradisi dan kurangnya kesadaran. Ganevo, seorang Project Officer Program GEMA CITA, mengingat masa-masa ini dengan jelas. Dia tahu, perubahan itu diperlukan.

In West Lombok Regency, West Nusa Tenggara, the issue of child marriage has long felt like a daunting challenge. The voices of the community, especially young people, were often drowned out by tradition and a lack of awareness. Ganevo, a Project Officer for the GEMA CITA (End Child Marriage) Program, recalls these times well. He knew change was needed.



Ganevo berdiskusi dengan salah satu pendidik sebaya mengenai kasus perkawinan anak. (Kredit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)

Ganevo discusses a child marriage case with a peer educator. (Credit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)

Saat GEMA CITA hadir di Kabupaten Lombok Barat tahun 2022, laki-laki yang akrab dipanggil Kak Vo ini ditugaskan untuk melakukan pendampingan pada lima sekolah dan dua desa di dua kabupaten tersebut. Program ini telah menjangkau sekitar 2.000-an remaja dan kaum muda berusia 13-24 tahun, sebuah tantangan besar yang tidak hanya membutuhkan dedikasi Ganevo tetapi juga perlu keterlibatan masyarakat yang strategis. Namun, yang menjadi fokus utama bukan hanya memberikan pendampingan kepada para remaja dan kaum muda, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan suara mereka didengar dan dihargai.

Proses yang Ganevo lalui selama dua tahun tidaklah mudah. Ia menghabiskan enam bulan dengan sabar untuk menjalin komunikasi dan membangun hubungan dengan pemerintah, pihak sekolah, dan peserta didik. Fondasi ini sangat penting karena nantinya akan memungkinkan interaksi dan kolaborasi yang lebih bermakna.

When GEMA CITA was introduced in West Lombok in 2022, Ganevo—affectionately called Kak Vo—was tasked with supporting five schools and two villages across two districts. The program reached around 2,000 youth aged 13-24, a daunting challenge that required not only Ganevo's dedication but also the strategic involvement of the broader community. However, the focus wasn't just on mentoring the youth; it was about creating an environment where their voices could be heard and valued.

The journey Ganevo embarked on over two years was far from easy. He spent six months of patient relationship-building communication and relationships with the government, schools, and students to lay the groundwork for meaningful interaction and collaboration.

"We maintained constant communication, both through formal and informal meetings," Ganevo said.



Ganevo berdiskusi dengan rekan kerjanya mengenai kasus perkawinan anak di Lombok Barat.
(Kredit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)
Ganevo discusses child marriage cases with his colleagues in West Lombok.
(Credit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)

“Kami terus menjalin komunikasi dengan teman-teman, baik pertemuan formal maupun informal,” ujar Ganevo.

Dalam prosesnya, perubahan-perubahan kecil mulai terlihat. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah pada remaja dan kaum muda. Semula, banyak dari mereka yang tertutup dan lebih individual. Namun, setelah mereka mengikuti serial diskusi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dan interaksi kelompok yang konsisten, para remaja dan kaum muda mulai terbuka. Mereka mulai saling berkomunikasi, mulai tumbuh pula rasa percaya terhadap sesama teman sebaya sehingga mereka saling menceritakan kondisi di lingkungan mereka atau keluarga mereka.

Bagi Ganevo, ini bukan sekadar komunikasi yang lebih baik—tetapi juga tentang kepercayaan. Ketika para peserta didik maupun mereka yang menjadi pendidik sebaya dalam GEMA CITA, mereka mulai berbagi cerita yang sangat pribadi, termasuk masalah yang terjadi dalam keluarga mereka.

Gradually, small changes began to emerge. One of the most striking transformations occurred among the youth. Initially, many were closed off and individualistic. But after participating in a series of discussions on Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) and consistent group interactions, they began to open up. Trust grew among them, and they started sharing personal stories about their lives and family situations with one another.

For Ganevo, it wasn't just about improved communication—it was about building trust. As the students, including peer educators in GEMA CITA, became more open, they started sharing deeply personal stories, including family issues.

In one case, a student confided in a peer educator about the violence they experienced at home. This confession prompted the peer educator to encourage the student to report the situation to the Community-Based Child Protection Team (PATBM). The PATBM team then intervened,



Ganevo berjalan menuju kantornya di Kabupaten Lombok Barat. (Kredit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)
Ganevo walks towards his office in West Lombok Regency. (Credit: Alfian Romli/Yayasan Plan International Indonesia)

Dalam satu kasus, misalnya, ada salah satu peserta didik yang bercerita kepada pendidik sebaya mengenai kekerasan yang ia alami di keluarganya. Pengakuan ini memicu pendidik sebaya untuk mendorong anak tersebut berani melapor ke PATBM. Kemudian tim PATBM pun melakukan penjangkauan ke keluarga, serta melakukan mediasi agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak sehingga mencegah kekerasan lebih lanjut.

Mendengarkan dan Memberi Kepercayaan

Bagi Ganevo, kesuksesan nyata dari Program GEMA CITA bukan hanya memberi advokasi atau edukasi, tetapi juga dalam memberdayakan para remaja dan kaum muda, mendorong mereka agar berani menyuarakan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka perlukan, serta mengambil tindakan atas hak-hak dasar mereka sebagai anak.

“Ini tentang membantu mereka menemukan suara mereka dan memahami apa yang benar-benar mereka butuhkan,” katanya.

Pendekatan ini berbeda dari pengalaman Ganevo sebelumnya saat ia menjadi fasilitator anak di Forum Anak. Di sinilah Ganevo menyadari pentingnya benar-benar mendengarkan para anak, remaja, dan kaum muda, serta membiarkan mereka memimpin berbagai diskusi tentang kebutuhan dan aspirasi mereka.

Dari pengalaman ini pula, Ganevo belajar untuk mengorganisir kegiatan anak dengan partisipasi yang lebih bermakna dari anak dan kaum muda. Tidak hanya menjadikan mereka sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang aktif terlibat dalam mengelola kegiatan. Hal ini berbeda dengan peran sebelumnya sebagai fasilitator anak, di mana saat itu ia lebih banyak mendengarkan kemauan orang dewasa. Kini, Ganevo lebih memahami dan lebih mendengarkan kebutuhan serta keinginan anak dan kaum muda, memberikan mereka kepercayaan penuh untuk melaksanakan kegiatan yang benar-benar dari, untuk, dan oleh anak serta kaum muda.

Festival Ramah Remaja

Pengalaman mendengarkan dan memberikan kepercayaan kepada kaum muda terbukti ketika para remaja di sekolah dampingan GEMA CITA melakukan aksi nyata. Salah satu inisiatif paling berkesan dan membuat diri Ganevo merasa

reaching out to the family and mediating to prevent further violence.

Listening and Building Trust

For Ganevo, the real success of the GEMA CITA Program wasn't just about advocacy or education—it was about empowering youth to voice their concerns, recognize their needs, and take action to claim their fundamental rights as children.

“It's about helping them find their voice and understanding what they truly need,” he explained.

This approach differed from Ganevo's earlier experiences as a child facilitator with the Children's Forum. It was during his work with GEMA CITA that Ganevo realized the importance of truly listening to young people and allowing them to lead discussions about their needs and aspirations.

Through these experiences, Ganevo learned how to organize activities that fostered more meaningful youth participation. Rather than treating them as passive participants, he made them active contributors, capable of managing activities. This was different from his previous role as a child facilitator, where he mainly responded to adult expectations. Now, Ganevo understood the importance of listening to the needs and desires of young people, giving them the trust and autonomy to create activities that were genuinely for, by, and about them.

Teen-Friendly Festival

The power of listening and trusting young people became evident when students involved in the GEMA CITA-supported schools took action. One of the most memorable initiatives—and a source of great pride for Ganevo—was when the students organized the Teen-Friendly Festival at SMAN 1 Lembar in West Lombok. This festival became a platform for youth to express the changes they wanted to see through various events, including poetry competitions, quizzes, and more.

Held in July 2022, the teens planned and led every aspect of the festival, from the initial planning stages to its execution. The Teen-



bangga adalah saat mereka mengorganisir Festival Remaja di SMAN 1 Lembar, Lombok Barat. Festival ini menjadi platform bagi para remaja dan kaum muda untuk menyuarakan perubahan yang mereka inginkan melalui beragam format acara, seperti lomba menulis puisi, cerdas cermat, dan lain-lain.

Di festival yang diadakan pada bulan Juli 2022 ini, para remaja sendiri yang menyiapkan dan memimpin seluruh prosesnya, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Festival Ramah Remaja bukan hanya sekadar festival semata, tetapi juga menjadi titik balik penting bagi mereka. Para guru, yang sebelumnya mungkin tidak sepenuhnya memahami atau mendukung kebutuhan anak dan kaum muda, mulai melihat pentingnya apa yang diperjuangkan oleh peserta didik melalui festival yang mereka gagas dan wujudkan.

GEMA CITA tidak hanya membawa perubahan pada remaja dan kaum muda di sekolah-sekolah yang Ganevo dampingi, tetapi juga pada diri Ganevo. Ia menyadari bahwa perubahan bisa dimulai dengan mendengarkan dan mempercayai suara para remaja dan kaum muda, di mana setiap suara didengar dan setiap harapan dihargai—mewariskan semangat yang akan terus berlanjut di Kabupaten Lombok Barat.

Ganevo berdiskusi dengan rekan kerjanya mengenai kasus perkawinan anak. (Kredit: Alfian Romli/ Yayasan Plan International Indonesia)

Ganevo discusses child marriage cases with his colleagues in West Lombok. (Credit: Alfian Romli/ Yayasan Plan International Indonesia)

Friendly Festival was not just an event; it marked a turning point for the students. Teachers, who may not have fully understood or supported their students' needs, began to see the significance of what the youth were advocating for through the festival they had created.

GEMA CITA didn't just bring about change for the youth in the schools Ganevo supported; it also transformed Ganevo himself. He realized that true change begins by listening to and trusting the voices of young people, ensuring that every voice is heard and every hope is valued—a spirit that will continue to resonate in West Lombok for years to come.



**Maria Fransiska Azi, Field Development Officer (FDO) program GEMA CITA di Kabupaten Nagekeo.
(Kredit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)**
Maria Fransiska Azi, Field Development Officer (FDO) of the GEMA CITA program in Nagekeo District.
(Credit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)

KAUM MUDA BERDAYA,

KEMENANGAN DARI TIMUR INDONESIA

EMPOWERING YOUTH: A VICTORY FROM EASTERN INDONESIA

Senyum lebar terpancar dari wajah Azi. Matanya berbinar-binar dan menatap penuh kekaguman. Ia begitu terkesan melihat remaja-remaja peserta Program Generasi Emas Bangsa Bebas Perkawinan Usia Anak (GEMA CITA) sedang asyik berdiskusi. “Adik-adik ini berbicara begitu santai tentang undang-undang dan mengaitkan segala sesuatunya dengan undang-undang. Di masa saya dulu, saya tidak seperti mereka,” tutur Azi.

Azi’s wide smile shone brightly, her eyes filled with admiration as she watched the young participants of the GEMA CITA (End Child Marriage) Program passionately discussing their thoughts. “These kids are casually talking about laws and making connections to regulations. In my day, I wasn’t like them,” she shared with a sense of awe.

Perempuan yang memiliki nama lengkap Maria Fransiska Azi ini begitu terkesan dengan kemampuan mereka. Sebagai Field Development Officer (FDO) Plan Indonesia, ia memikul tanggung jawab besar sebagai penanggung jawab program GEMA CITA di Desa Marapokot dan Desa Tengtiba yang ada di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perjalanannya sebagai staf lapangan tentu penuh tantangan. Namun, pada perjalanan tersebut, ada kemenangan-kemenangan kecil yang Azi rasakan.

Di Program GEMA CITA ini, Azi mendampingi anak dan kaum muda untuk meningkatkan pemahaman mereka—khususnya kaum muda perempuan—agar dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai hak-hak reproduksi dan masa depan mereka. Azi menjelaskan, “Kami melatih mereka untuk mengambil keputusan penting dalam hidup mereka, termasuk kapan mereka siap menikah. Kami ingin mereka memahami hak-hak mereka dan memiliki kekuatan untuk mengatakan ‘tidak’ pada perkawinan di usia anak.”

Maria Fransiska Azi, or simply Azi, is a Field Development Officer (FDO) for Plan Indonesia. She carries the significant responsibility of overseeing the GEMA CITA Program in Marapokot and Tengtiba, two villages in the Aesesa sub-district of Nagekeo, East Nusa Tenggara Province. Her journey as a field officer has been marked by challenges, but within, Azi has experienced small victories that fuel her determination.

Through GEMA CITA, Azi mentors children and youth, especially young girls, helping them understand how to make informed decisions about their reproductive rights and future. “We teach them to make crucial decisions about their lives, like when they’re ready for marriage.

We want them to understand their rights and feel empowered to say ‘no’ to child marriage,” Azi explained.

Mendidik untuk Berdaya

Program GEMA CITA hadir di Nagekeo pada bulan November 2023 dengan menargetkan dua desa, yaitu Desa Marapokot dan Desa Tengtiba. Desa Marapokot dipilih karena tingkat perkawinan anak yang masih tinggi. Di Marapokot, hampir setiap tahun ada anak yang menikah di bawah umur. Sedangkan Desa Tengtiba dipilih karena berhasil mengadvokasi dana desa untuk mendukung program-program yang berfokus pada anak; menjadikannya contoh ideal untuk direplikasi desa-desa lainnya.

Di dua desa tersebut, edukasi pencegahan perkawinan anak dilakukan di sekolah-sekolah timur Indonesia, di antaranya di SMPN 1 Aesesa Selatan yang berada di Tengtiba dan juga di SMPK dan SMAK Stella Maris di Marapokot. Menurut Azi, edukasi memang dimulai dari sekolah-sekolah karena lebih bisa menjangkau anak dan kaum muda secara langsung. Tidak hanya di sekolah, edukasi juga dilakukan kepada masyarakat di komunitas sekitar sekolah melalui Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD).

Azi dan timnya mengadakan kegiatan edukasi yang komprehensif di sekolah-sekolah lokal, seperti SMPK Stella Maris Marapokot dan SMK Stella Maris Marapokot, dengan menekankan tujuan utama program: mengurangi tingkat perkawinan anak. Azi yang pernah bergabung dengan beberapa program lain yang juga diinisiasi oleh Plan Indonesia, merasakan betul bahwa program ini menghadapi tantangan besar dalam menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan komunitas yang lebih luas. Ia menyadari masih adanya kesenjangan kritis dalam komunikasi.

Untungnya antusiasme dan semangat 20 kaum muda yang merupakan anggota Youth Advisory Panel (YAP) dan Forum Anak Nagekeo dari Desa Marapokot dan Desa Tengtiba, dapat menjawab tantangan tersebut. Semangat untuk menghapus perkawinan anak tersebut menjadi katalis perubahan dalam melakukan edukasi di komunitas mereka dan membawa pesan penting tentang pencegahan perkawinan anak.

Dalam melakukan usaha perubahan, 20 kaum muda tersebut dibekali dengan kemampuan strategi advokasi yang responsive gender, jurnalisme, penelitian, dan analisis legislatif.

“Jadi, adik-adik ini kami ajak untuk sama-sama membedah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Educating to Empower

The GEMA CITA program launched in Nagekeo in November 2023, targeting two villages: Marapokot, where child marriage rates remain high, and Tengtiba, which has successfully advocated for village funds to support child-focused programs. This success made Tengtiba an ideal model for other villages to follow.

In both villages, the program’s educational activities to prevent child marriage were mainly conducted in schools, including SMPN 1 Aesesa Selatan in Tengtiba and SMPK and SMAK Stella Maris in Marapokot. Azi explained that starting in schools allowed the program to reach children and youth directly. Education extended beyond the classroom, too, engaging the wider community through the Village Child Protection Groups (KPAD).

Azi and her team led comprehensive educational initiatives at local schools, emphasizing the program’s primary goal: reducing child marriage. Having been involved in other Plan Indonesia programs, Azi knew the challenges that lay ahead, particularly in raising awareness and engaging the broader community. She quickly identified a critical gap in communication.

Fortunately, the enthusiasm and dedication of 20 youth from the Youth Advisory Panel (YAP) and Nagekeo Children’s Forum in Marapokot and Tengtiba helped bridge this gap. Their passion for ending child marriage became a catalyst for change, spreading the important message of child marriage prevention throughout their communities.

These 20 young advocates were equipped with skills in gender-responsive advocacy, journalism, research, and legislative analysis. “We worked with them to dissect Law No. 16 of 2019 on marriage, Ministerial Regulation No. 5 on unwanted pregnancies, and the Nagekeo Governor’s Regulation on child marriage prevention,” Azi explained.

Within six months, tangible changes began to emerge. “At least, we started seeing real shifts in understanding and behavior. The youth began engaging in meaningful discussions about regulations—something they had never done before,” Azi noted.

tentang perkawinan, Peraturan Menteri No. 5 yang berkaitan dengan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), dan juga Pergub Nagekeo yang mengatur tentang pencegahan perkawinan anak,” kata Azi menjelaskan.

Melalui inisiatif akar rumput ini, hanya dalam waktu enam bulan, perubahan-perubahan mulai terlihat. “Setidaknya ada perubahan nyata dalam pemahaman dan perilaku kaum muda. Mereka mulai terlibat dalam diskusi bermakna tentang regulasi, sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya,” kata Azi.

Azi juga menyadari pentingnya melibatkan remaja sebagai pendidik sebaya (*peer educator*) dan perubahan-perubahan kecil itu pun mulai terlihat dalam diri kaum muda. “Mereka sudah bisa melakukan edukasi dampak perkawinan anak kepada teman sebaya dan orang tua di dusun-dusun, dan mereka juga semakin berani mengambil keputusan terbaik untuk diri mereka dan komunitas mereka,” jelas Azi. Bagi Azi, ini menunjukkan bagaimana anak dan kaum muda tidak hanya menjadi penerima informasi tetapi juga agen perubahan yang aktif.

Perubahan Perspektif dan Penguatan Kapasitas

Seiring berjalannya program, perubahan-perubahan itu tidak hanya pada remaja dan kaum muda yang terlibat dalam Program GEMA CITA. Azi pun merasakan hal yang sama. Program ini membawa Azi semakin dekat dengan mereka.

“Saya sadar bahwa sebagai orang dewasa, peran kita seharusnya bukan hanya memberi advokasi atau edukasi, tetapi juga memberdayakan para remaja agar berani menyuarakan apa yang mereka rasakan dan perlukan, serta mengambil tindakan atas hak-hak dasar mereka,” ujarnya.

Sebelumnya, upaya edukasi Azi tentang pencegahan perkawinan anak terbatas pada pertemuan keluarga dari anak dan kaum muda yang pernah mengikuti atau terlibat dalam program-program Plan Indonesia. Namun, dengan adanya Program GEMA CITA, Azi lebih sering melakukan kunjungan rumah untuk berinteraksi langsung dengan keluarga, serta anak dan kaum muda yang berisiko melakukan perkawinan anak.

Tak cuma itu saja. Pengalaman sebagai FDO di bawah Program GEMA CITA telah mendorong Azi

Azi also observed the importance of involving peer educators and how these small changes started to manifest. “They’re now educating their peers and even their parents about the impact of child marriage, and they’re becoming more confident in making decisions for themselves and their communities,” she added. For Azi, this demonstrated how young people were not just passive recipients of information but active agents of change.

Shifting Perspectives and Building Capacity

As the program progressed, it wasn’t just the youth who transformed—Azi did, too. The program brought her closer to the young people she worked with, shifting her own perspective on her role.

“I realized that our role as adults isn’t just to provide advocacy or education, but to empower youth to voice their needs, express their desires, and take action on their basic rights,” she reflected.

Previously, Azi’s efforts to educate about child marriage prevention were limited to meetings with families of young people who had participated in Plan Indonesia’s programs. But with GEMA CITA, she began making more frequent home visits, directly interacting with families and children at risk of child marriage.

Additionally, her role as an FDO under GEMA CITA also pushed her to deepen her understanding of laws, government regulations, and local policies.

“Before, I knew the law numbers and relevant articles, but I didn’t fully understand them. Now, after being part of this program and participating in legal discussions with GEMA CITA participants, I have a much better grasp of the regulations and policies,” said Azi. This knowledge has boosted her confidence in educating communities about child marriage prevention in Marapokot and beyond.

untuk lebih memahami undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan local.

“Dulu, saya hanya tahu nomor undang-undangnya dan pasal apa yang relevan, tetapi saya tidak benar-benar memahaminya. Sekarang, setelah menjadi bagian dari program ini dan mengikuti kegiatan bedah undang-undang bersama peserta GEMA CITA, saya juga jadi lebih paham tentang regulasi dan kebijakan yang ada,” kata Azi. Pengetahuan ini juga yang memberinya kepercayaan diri saat melakukan edukasi pencegahan perkawinan anak di Desa Marapokot dan sekitarnya.

Mengukur Dampak dan Melihat ke Depan

Meskipun periode program cukup singkat, Program GEMA CITA di Nagekeo telah membangun fondasi untuk mencapai perubahan perilaku yang luas. Azi melihat perubahan signifikan dalam dirinya dan cara ia bekerja. Dengan pengetahuan hukum yang lebih baik dan kemampuan advokasi yang lebih tajam, Azi sekarang lebih proaktif dalam memengaruhi kebijakan desa, termasuk menjadi bagian dari Plan Indonesia dalam mengadvokasi dan mendampingi pembentukan Perdes Perlindungan Anak di Desa Nangadhero.

“Sebelumnya, saya mungkin merasa itu hak mereka untuk menikah muda. Namun sekarang, dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan, saya melihat bahwa anak yang menikah di usia anak adalah korban karena kita sebagai orang dewasa jarang memotivasi dia, jarang memberikan masukan terkait dampak perkawinan anak. Ini adalah tugas kita sebagai orang dewasa,” kata Azi menegaskan.

Pendekatan baru ini juga mendorongnya untuk terus membina remaja dan kaum muda sebagai pendidik sebaya yang mandiri dan proaktif dalam kegiatan di desa mereka sehingga mereka menemukan kemampuan mereka. Antusiasme oleh kaum muda Nagekeo juga kian menumbuhkan semangat Azi sebagai FDO maupun orang dewasa, dalam menghadapi tantangan di komunitas untuk menghapus perkawinan anak.

Azi tetap optimis dan ambisius akan masa depan kaum muda di tanah kelahirannya. Ia berharap semangat kaum muda dan Program GEMA CITA ini bisa direplikasi di semua 44 desa di Nagekeo sehingga memperluas jangkauan program dan memastikan setiap anak dan kaum muda terdidik serta berdaya.

Measuring Impact and Looking Ahead

Although the program’s timeframe was short, GEMA CITA in Nagekeo laid the groundwork for lasting behavioral change. Azi has seen significant shifts in both her approach and her work. With her enhanced legal knowledge and sharpened advocacy skills, she is now more proactive in influencing village policies, including being part of Plan Indonesia to advocate and support the establishment of village regulations on child protection in Nangadhero.

“Previously, I might have thought it was their right to marry young. But now, with a deeper understanding of policy, I see that children who marry young are victims because we, as adults, haven’t done enough to guide or advise them about the consequences of child marriage. It’s our responsibility as adults,” Azi emphasized.

This new approach has also driven her to continue nurturing youth as independent, proactive peer educators in their communities, and helping them discover their potential. The enthusiasm of the young people in Nagekeo continues to inspire Azi, as both an FDO and an adult ally, fueling her commitment to ending child marriage.

Azi remains optimistic and ambitious about the future of youth in her homeland. She hopes that the spirit of these young people, along with the success of the GEMA CITA Program, can be replicated across all 44 villages in Nagekeo, expanding the program’s reach and ensuring that every child and young person is educated and empowered.





Maria Fransiska Azi berdiskusi dengan dua orang kerjanya mengenai kasus perkawinan anak dan upaya pencegahannya di Kabupaten Nagekeo.
(Kredit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)
Maria Fransiska Azi discusses child marriage cases and prevention efforts in Nagekeo District with two of her colleagues. (Credit: Vickram Sombu/Yayasan Plan International Indonesia)



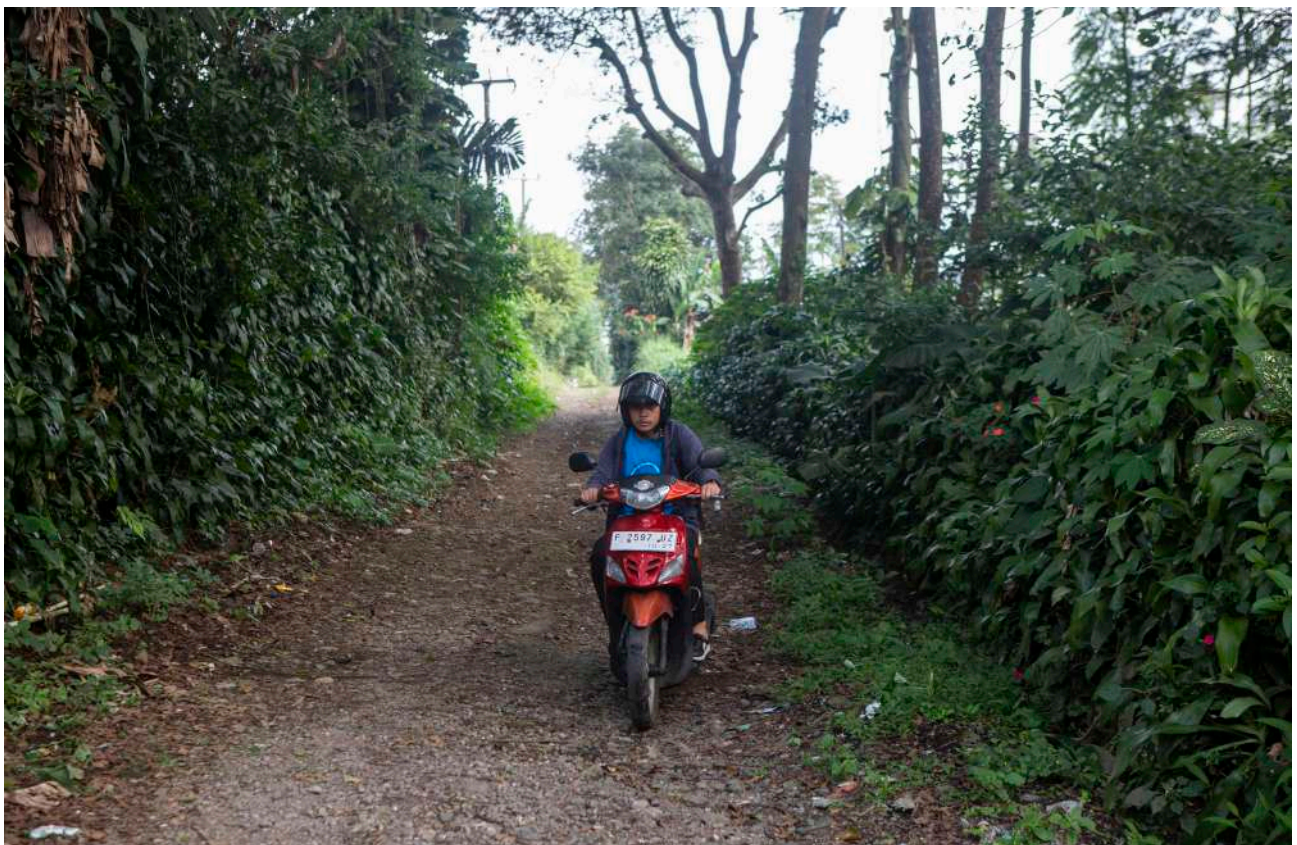
Didit Handika, *project officer* program GEMA CITA oleh Plan Indonesia di Kabupaten Sukabumi.
(Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)
Didit Handika, Project Officer for the GEMA CITA program by Plan Indonesia in Sukabumi District.
(Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)

DARI DESA KE DESA, **BERJUANG** CEGAH PERKAWINAN ANAK

FROM VILLAGE TO VILLAGE: A UNITED FIGHT AGAINST CHILD MARRIAGE

Di balik deru mesin motor *matic*-nya yang berwarna merah, Didit Handika melaju di jalan-jalan berliku di Kabupaten Sukabumi. Setiap kilometer yang ia tempuh bukan sekadar perjalanan biasa; setiap putaran roda membawa misi penting untuk mengubah masa depan kaum muda di desa-desa yang ia damping.

The steady hum of his red motorbike echoed along the winding roads of Sukabumi, as Didit Handika knew that each kilometer he traveled carried more than just the weight of his journey. Every turn and every stretch of road he covered held a deeper purpose: to change the futures of young people in the villages he supported.



Didit, mengendarai sepeda motornya menuju lokasi program di Kabupaten Sukabumi.
(Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)
Didit rides his motorcycle to the program location in Sukabumi District.
(Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)

Sebagai *Project Officer* Program GEMA CITA, Didit tidak lagi hanya menolak perkawinan anak secara prinsip. Didit bersama Tim GEMA CITA, kini berdiri di garis depan, mulai dari bertemu dengan pelaku perkawinan anak, berkomunikasi dengan pihak sekolah maupun pemerintah setempat, hingga menyampaikan argumen-argumen yang tepat kepada pemerintah setempat, baik di level kabupaten hingga perangkat desa.

Di Program GEMA CITA ini, Didit melakukan pendampingan pada lima sekolah dengan jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Madrasah, Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta dua desa untuk upaya pencegahan kawin anak. Hal ini telah ia lakoni sejak GEMA CITA hadir di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2022.

Transformasi Pribadi

Selama dua tahun terakhir, perubahan signifikan tidak hanya terjadi pada lingkungan sekolah dan desa yang Didit damping tetapi juga dalam dirinya sendiri. Bukan hanya perspektif Didit yang berubah, tetapi juga keyakinan dan kemampuannya dalam menangani isu perkawinan anak. Meski Didit memiliki ketertarikan untuk fokus pada isu perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan sejak masa SMA, pengalamannya dalam GEMA CITA dan turun langsung ke lapangan, membuka mata Didit pada isu pencegahan perkawinan anak. Keterlibatannya dalam program ini telah mengubah perspektifnya secara mandalam.

“Dulu mungkin saya menganggap anak dan kaum muda sulit nih untuk diberi ruang mereka berbicara dan terbatas,” kenangnya. “Nah, tapi setelah saya mendampingi Program GEMA CITA, saya melihat bahwa anak dan kaum muda, ketika didampingi dan diberi kapasitas yang baik, mereka bisa *lho* setara dengan orang dewasa. Mereka bisa menyampaikan apa kebutuhan mereka selama ini.”

Pengalaman ini tidak hanya mengubah cara pandang Didit terhadap anak dan kaum muda tetapi juga membentuk keberaniannya untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Didit menemukan keberanian dalam dirinya untuk bernegosiasi dan berargumentasi dengan pihak-pihak yang memiliki otoritas tinggi, seperti kepala dinas atau bahkan sekelas bupati,

As the Project Officer for the GEMA CITA (End Child Marriage) Program, Didit’s role extends far beyond simply opposing child marriage in principle. Now, alongside the GEMA CITA team, Didit stands on the frontlines—meeting with those involved in child marriages, negotiating with schools, and presenting compelling arguments to local governments, from district officials to village leaders.

Since the GEMA CITA program was launched in Sukabumi in 2022, Didit has been working closely with five schools—ranging from madrasahs to secondary and high schools—as well as two villages, all with the aim of preventing child marriage. This mission has not only impacted the communities he serves but also deeply transformed Didit personally.

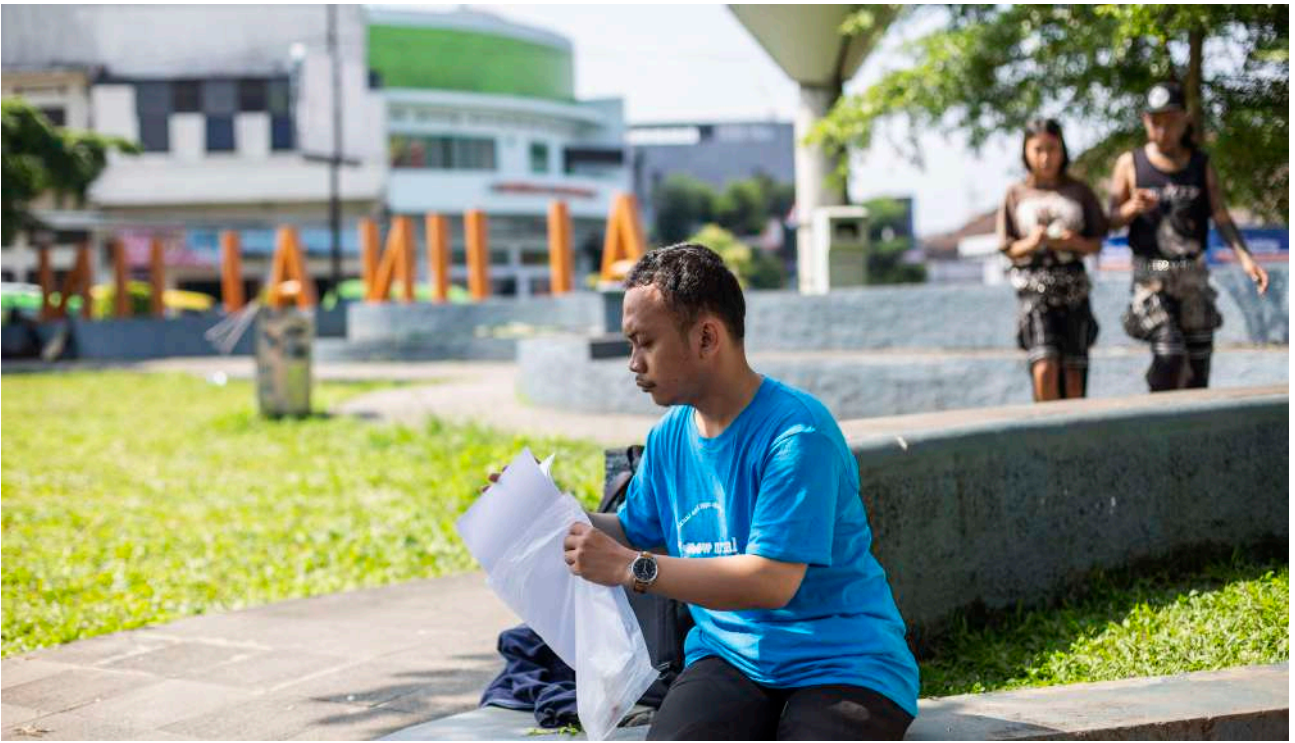
A Personal Transformation

Over the past two years, the changes Didit has witnessed have not only taken root in the schools and villages he supports but also shaped him. His confidence and capabilities in tackling the complex realities of child marriage prevention have grown. While his interest in child protection and women’s empowerment began in high school, his experience with GEMA CITA—working directly in the field—revealed the depth of the issue and the complex realities of child marriage prevention.

“Before, I used to think it was difficult for children and youth to have a platform to speak, that their voices were limited,” Didit recalled. “But after working with GEMA CITA, I saw that when they are properly guided and empowered, young people can stand on equal footing with adults. They can express what they need clearly.”

This experience not only shifted Didit’s perspective but also emboldened him to do things he never thought possible. He discovered within himself the ability to negotiate with high-ranking officials—such as department heads or even the regent—and advocate for policies that protect children and youth.

“Being part of this program has pushed me to be ready to argue and explain why preventing child marriage is something we must fight for,” Didit



Didit, menyiapkan berkas-berkas sebelum bertemu dengan pegawai pemerintahan di Kabupaten Sukabumi.
(Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan Internasional Indonesia)
Didit prepares documents before meeting with government officials in Sukabumi District.
(Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan Internasional Indonesia)



Didit, membuat poster kampanye pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sukabumi.
(Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan Internasional Indonesia)
Didit creates a campaign poster on child marriage prevention in Sukabumi District.
(Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan Internasional Indonesia)



Didit berdiskusi dengan peserta didik mengenai pencegahan perkawinan anak dan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di Kabupaten Sukabumi. (Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)
Didit discusses child marriage prevention and Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) with students in Sukabumi District. (Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)

demi memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada anak dan kaum muda.

“Ketika di program ini, saya memang harus siap dengan kondisi di mana saya harus siap berargumentasi dan menjelaskan mengapa pencegahan perkawinan anak ini penting kita perjuangkan,” ujar Didit. “Ini yang menurut saya sesuatu hal yang membuat diri saya bangga karena dulu ruang seperti ini jarang saya dapatkan.”

Menggerakkan Perubahan Kebijakan dan Pendidikan di Kabupaten Sukabumi

Selama dua tahun program berjalan, salah satu tonggak penting dalam perjalanan Didit sebagai Project Officer adalah saat ia bersama para pendidik sebaya (*peer educator*), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan tim Sekolah Ramah Anak (SRA), berhasil mendorong revisi Peraturan Bupati (Perbup) Sukabumi No. 18 Tahun 2021. Peraturan ini belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan perlindungan anak. Namun, berkat kerja keras dan melalui diskusi serta kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), revisi tersebut berhasil dilakukan; menandai pencapaian penting dalam advokasi yang gigih dan terinformasi.

Namun, perubahan kebijakan bukanlah satu-satunya pencapaian. Pemerintah kabupaten (Pemkab) juga menunjukkan komitmen nyata dengan membentuk tim pencegahan perkawinan anak. Dengan adanya

shared. “I’m proud of myself because I’ve had opportunities I never thought I’d have.”

Driving Policy and Education Change in Sukabumi

One of the most significant milestones during Didit’s time as a Project Officer came when he, along with peer educators, the Village-Based Child Protection (PATBM) group, and the Child-Friendly School (SRA) team, succeeded in revising Sukabumi’s Regent Regulation (Perbup) No. 18 of 2021. Initially, the regulation did not fully address child protection needs. However, through perseverance, discussions, and collaboration with the Office for Women’s Empowerment and Child Protection (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - DP3A), the revision was achieved. This marked a significant achievement in persistent and informed advocacy.

Policy change wasn’t the only accomplishment. The local government also showed its commitment by establishing a team dedicated to preventing child marriage. This team developed action plans that were implemented through the regional action plans (Rencana Aksi Daerah-RAD). For Didit, this success demonstrated that sustained effort and a unified voice can make a meaningful impact.

tim ini, Pemkab juga membuat rencana-rencana kerja yang diimplementasikan melalui rencana aksi daerah (RAD). Bagi Didit, ini adalah bukti bahwa suara dan upaya yang konsisten dapat menciptakan dampak yang signifikan.

Proses Pembelajaran dan Perubahan Perspektif

Dari perubahan-perubahan yang terjadi, Didit belajar bahwa proses penerimaan dari masyarakat adalah sesuatu yang bertahap. Ia menyadari bahwa nilai-nilai yang diyakini sebagai kebenaran oleh masyarakat tidak bisa diubah dalam semalam.

“Namun, ketika kita hadir dan mendiskusikan secara formal dan informal, pada akhirnya perspektif mereka berubah dan juga berdampak pada perilaku yang juga berubah,” jelas Didit.

Sebagai bagian dari perjalanan transformasinya, Didit juga menekankan pentingnya advokasi langsung dan keberanian dalam menghadapi tantangan di lapangan. Ketika terjun langsung ke rumah-rumah keluarga yang berisiko melakukan perkawinan anak, Didit pun harus menggunakan keterampilan negosiasi dan empati yang lebih dalam. “Ketika ada kasus di satu kecamatan, saya datang ke rumahnya, ngobrol dengan pelakunya, dengan korbannya. Ini hal yang baru menurut saya dan itu saya lakukan. Saya tidak menyangka saya bisa melakukan itu,” jelas Didit.

Learning and Shifting Perspectives

Throughout his journey, Didit has learned that societal acceptance of new ideas happens gradually. He recognized that long-held beliefs and traditions cannot be shifted overnight.

“But when we’re present, when we engage in formal and informally discussions, perspectives change. And that, in turn, changes behavior,” Didit explained.

As part of his journey, Didit has emphasized the importance of direct advocacy and the courage to face challenges head-on. Visiting the homes of families at risk of child marriage required deep empathy and negotiation skills. “When there’s a case in a particular district, I visit the family’s home, talk with the parents, the children—both those the perpetrators and the victims. This was new for me, something I hadn’t envisioned doing,” Didit said.

Measuring Success

With a background in teacher education, working with young people isn’t new to Didit. But his involvement in the GEMA CITA Program has transformed how he measured success—not just in terms of the number of activities conducted, but about the real-life impact on the lives of children and youth.



Didit berdiskusi dengan peserta didik mengenai pencegahan perkawinan anak dan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di Kabupaten Sukabumi. (Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)
Didit discusses child marriage prevention and Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) with students in Sukabumi District. (Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)



Peserta didik mengikuti diskusi mengenai pencegahan perkawinan anak dan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di Kabupaten Sukabumi. (Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)

Students participate in a discussion on child marriage prevention and Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) in Sukabumi District. (Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)

Mengukur Keberhasilan

Berkutat dengan isu pendidikan bukanlah hal baru bagi Didit. Dengan latar belakang pendidikan keguruan, ia telah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan. Namun, keterlibatannya dalam Program GEMA CITA membawa perubahan besar dalam cara pandangnya. Di program ini, ia menemukan tolok ukur keberhasilan yang jelas, tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas; bahwasanya, keberhasilan dalam program ini tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang terlaksana, tetapi juga dari dampak nyata yang dihasilkan terhadap kualitas hidup anak dan kaum muda.

Melalui interaksi langsung dengan para pendidik sebaya dan komunitas, Didit menyadari pentingnya mendengarkan suara kaum muda secara lebih mendalam dan menghargai ide serta masukan mereka sebagai bagian penting dari proses perubahan. Pengalaman ini mengubah Didit dari yang semula berfokus pada proses pengajaran kini menjadi lebih memahami bahwa perubahan sosial membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif. Ia belajar bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang memenuhi kuota, tetapi

By engaging directly with peer educators and the community, Didit realized the importance of listening to young people and valuing their ideas and input as essential to the change process. This experience shifted his focus from simply teaching to understand that meaningful social change requires a holistic and collaborative approach. He learned that true success isn't just about hitting targets, but about creating an environment where young people feel heard, valued, and empowered to contribute meaningfully to their futures.

Reflecting on the thousands of kilometers he has traveled, Didit understood that real change requires commitment, patience, and bravery. His time supporting schools and villages didn't just change the communities he worked with—it transformed him too. No longer just an observer, Didit now finds himself at the heart of meaningful, direct action—driving change that makes a lasting difference.

tentang menciptakan lingkungan di mana anak dan kaum muda merasa didengar, dihargai, dan mampu berkontribusi secara nyata untuk masa depan mereka.

Dari ribuan kilometer yang telah ia tempuh, Didit menyadari bahwa perubahan sejati memerlukan komitmen, kesabaran, dan keberanian. Pengalaman yang ia lalui selama mendampingi sekolah-sekolah dan desa-desa tersebut tidak hanya membawa perubahan di lingkungan tempat ia bekerja, tetapi juga mengubah dirinya. Dari seseorang yang mungkin hanya melihat masalah dari kejauhan, Didit sekarang berada di pusaran untuk melakukan perubahan yang berdampak langsung di tengah masyarakat.



Didit berdiskusi bersama peserta didik mengenai poster kampanye HKSR di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
(Kredit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)
Didit discusses campaign posters on SRHR with students in Sukabumi District.
(Credit: Agoes Rudianto/Yayasan Plan International Indonesia)





Yayasan Plan International Indonesia

Komplek Buncit Utama Kav. 16
Jl. Warung Jati Barat RT 001/RW 005
Kelurahan Jati padang, Kecamatan Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12549

   PlanIndonesia
plan-international.or.id